PERAN END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT) INDONESIA DALAM MEMBANTU PEMERINTAH INDONESIA MENGATASI KEJAHATAN PARIWISATA SEKS ANAK

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos.) dalam bidang Hubungan Internasional



Oleh

Ruri Wijareni

NIM 192219091

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2023

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

: Ruri Wijareni

NIM

: 192219091

Program Studi : Hubungan Iternasional

Judul Skripsi : Peran End Child Prostitution, Child Pornography and

Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)

Indonesia dalam Membantu Pemerintah Indonesia

Mengatasi Kejahatan Pariwisata Seks Anak.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.

2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.

3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 19 Juni 2023

Yang menyatakan

Ruri Wijareni

NIM: 192219091

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama

: Ruri Wijareni

NIM

: 192219091

Program Studi

: Hubungan Internasional

yang bejudul: Peran End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia dalam Membantu Pemerintah Indonesia Mengatasi Kejahatan Pariwisata Seks Anak, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 20 Juni 2023

Pembimbing

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR. NIP 198408232015031002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Ruri Wiajreni dengan judul: "Peran End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia dalam Membantu Pemerintah Indonesia Mengatasi Kejahatan Pariwisata Seks Anak" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 3 Juli 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR. NIP 198408232015031002

Penguji III

Nur Luthfi Hidayatullah, S.I.P., M.Hub.Int. NIP 199104092020121012 Penguji II

Moh. Fathoni Hakim, M.Si. NIP 198401052011011008

Penguji IV

Dr. Abid Rohman, S.Ag, M.Pd.I. NIP 197706232007101006

Surabaya,

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

72000031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Ruri Wijareni	
NIM	: 192219091	
Fakultas/Jurusan	: FISIP/Hubungan Internasional	
E-mail address	: wijarenirury@gmail.com	
UIN Sunan Ampe ☑ Skripsi □ yang berjudul: Peran End Child	n ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaa urabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Desertasi Lain-lain () rostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexua Indonesia dalam Membantu Pemerintah Indonesia Mengatasi Kejahata	
Perpustakaan UII mengelolanya di menampilkan/men akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.	
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.	

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2023 Penulis,

(Ruri Wijareni)

ABSTRACT

Ruri Wijareni, 2023. The Role of End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia in Helping the Indonesian Government in Overcoming Child Sex Tourism Crimes, Undergraduate Thesis for the International Relations Study Program, The Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

This study aims to find out how the role of ECPAT Indonesia in helping the government overcoming the crime of child sex tourism. The researcher used a qualitative approach with descriptive research questions. In collecting data, the researcher used documentation and interview data collection techniques. The data analysis technique used in this study is an interactionist analysis technique according to Miles and Huberman. The researcher found that there were four forms of ECPAT Indonesia's role in helping the government in overcoming the crime of child sex tourism. First, protection by helping victims with legal assistance. Second, prevention by raising awareness in the form of campaigns and outreach about child sex tourism crimes in Indonesia. Third, advocacy by encourageing the government to make better rules or regulations and policies to eliminate child sex tourism crimes in Indonesia. Fourth, cooperation by collaborating with public and private parties such as the Ministry of Tourism, Ministry of PPPA, etc.

Keywords: Role, ECPAT Indonesia, Child Sex Tourism

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran ECPAT Indonesia dalam membantu pemerintah Indonesia mengatasi kejahatan pariwisata seks anak. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pertanyaan penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaksionis menurut Miles dan Huberman. Peneliti menemukan bahwa terdapat empat bentuk peran ECPAT Indonesia dalam membantu pemerintah mengatasi kejahatan pariwisata seks anak. Pertama, peran dalam bentuk perlindungan dimana ECPAT Indonesia membantu para korban dengan bantuan hukum. Kedua, peran dalam bentuk pencegahan dimana ECPAT Indonesia meningkatkan kesadaran dalam bentuk kampanye dan sosialisasi tentang kejahatan pariwisata seks anak di Indonesia. Ketiga, peran dalam bentuk advokasi dimana ECPAT Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat peraturan atau regulasi dan kebijakan yang lebih baik untuk menghapus kejahatan pariwisata seks anak di Indonesia. Keempat, peran dalam bentuk wisata dimana ECPAT Indonesia berkolaborasi dengan pihak publik dan swasta seperti Kemenpar, KemenPPPA, dan lain-lain.

Kata Kunci: Peran, ECPAT Indonesia, Pariwisata Seks Anak

DAFTAR ISI

JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	V
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	X
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian E. Tinjauan Pustaka	11 12
F. Argumentasi Utama	22
G. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	24
A. Peran INGO	24
B. INGO (International Non-Governmental Organization)	26
C. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking o	f
Children for Sexual Purposes)	27
D. Pariwisata Seks Anak	28
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Subjek dan Peringkat Analisis	30
C. Teknik Sampling	31
D. Teknik Pengumpulan Data	
E. Teknik Analisis Data	32
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	34
G. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
H. Tahap-Tahap Penelitian	35
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum ECPAT	
B. Permasalahan Pariwisata Seks Anak di Indonesia	46
C. Peran ECPAT Indonesia: Perlindungan	52
D. Peran ECPAT Indonesia: Pencegahan	
E. Peran ECPAT Indonesia: Advokasi	62
F. Peran ECPAT Indonesia: Kerja sama	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
I AMDID ANI	:::

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen Analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman 34
Gambar 2. Logo ECPAT Indonesia
Gambar 3. Struktur Organisasi ECPAT Indonesia
Gambar 4. Lokakarya Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus dengan Mitra
UPTD PPA Kabupaten Sleman
Gambar 5. Langkah Awal dalam Melindungi Anak dari Situasi Eksploitasi
Seksual di Destinasi Wisata bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
(GIPI)
Gambar 6. Kampanye Wujudkan Bersama Asian Games 2018 Ramah Anak 58
Gambar 7. Penandatanganan Bergabungnya Archipelago International sebagai
Bagian dari The Code
Gambar 8. Pertemuan Penysusuna <mark>n Laporan OPSC d</mark> an OPAC di KemenPPPA 64
Gambar 9. Eksplorasi Kerja sama ECPAT Indonesia dengan Kementrian
Pariwisata
Gambar 10. Kampanye ECPAT Indoensia dengan Angkasa Pura II di Bandara
Soekarno-Hatta terkait Pencegahan Pariwisata Seks Anak
Gambar 11. Kerja sama ECPAT Indonesia bersama LPSK dalam Rangka
Melindungi Anak Indonesia terhadapa Kejahatan Pariwisata Seks Anak
Gambar 12. Workshop Penyusunan Panduan Desa Wisata Ramah Anak dalam
Rangka Kerja sama ECPAT Indonesia dengan KemenPPPA74
Gambar 13. Pencegahan Pariwisata Seks Anak melalui Transportasi Taksi 77
Gambar 14. Bersama Memerangi Pariwisata Seks Anak: Kerja sama ECPAT
Indonesia dengan ASPPI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ialah pelanggaran berat terhadap hak anak yang menjadi bentuk hinaan pada harkat martabat manusia. Bentuk dari ESKA beragam dan semuanya mempunyai pengaruh yang dapat merusak masa depan anak-anak dan masyarakat di tempat terjadinya ESKA tersebut. ESKA memiliki bentuk utama berupa pelacuran anak, pariwisata seks anak, perdagangan anak, maupun pornografi anak untuk tujuan sesksual. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ESKA seperti tidak meratanya kekayaan, permintaan guna melakukan hubungan seksual dengan seorang anak, tidak setaranya gender, konflik bersenjata, sikap sosial, ataupun konsumerisme yang berlebih.² Kerugian yang didapatkan korban baik secara moril serta materil tidaklah mudah untuk dipulihkan, hal ini yang menjadikan permasalahan ESKA ke dalam masalah terpenting. Anak-anak memiliki masa yang harus diisi dengan belajar serta bermain, namun sebab ESKA menjadi masa yang kelam.³

Media dan masyarakat memberikan perhatian yang besar pada salah satu bentuk ESKA yang disebut Pariwisata Seks Anak (PSA). PSA merupakan situasi dimana anak-anak dieksploitasi untuk tujuan sesksual yang terjadi didalam sektor

² Hero Nehemia Lasapu, Deicy N. Karamoy, dan Lusy K.F.R Gerungan, —PERLINDUNGAN ANAK ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989,". diakses 3 Mei 2023.

³ Yohanes Benedicktus Meninu Nalele, —PERAN END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES (ECPAT) DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIL ANAK (ESKA) DI INDONESIA (2011 – 2015),", 19.

pariwisata. PSA merupakan ujian yang berat dan menjadi tantangan penting bagi para industri pariwisata yang selalu mengalami perkembangan.

Pariwisata ialah salah satu sektor yang memberi kontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan maupun ekonomi pada suatu negara. Akan tetapi, pada sisi lain industri ini patut untuk diwaspadai, hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya praktek transaksi ranah seksual di wilayah wisata yang dimana tidak hanya terfokus pada orang dewasa saja namun disertai anak-anak, istilah ini disebut sebagai PSA. Dimana dalam prakteknya, bidang usaha seperti penginapan, biro perjalanan, maupun tempat hiburan yang dibuka secara langsung dan tidak langsung sangatlah mempunyai peran yang berpengaruh dalam tingkat terjadinya praktek tindak kejahatan, akan tetapi dilain sisi juga dapat menjadi aspek kunci dalam penanggulangannya.⁴

Seperti kita ketahui negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan berbagai bentuk peluang wisata, sebab Indonesia mempunyai berbagai macam suku, budaya, adat-istiadat hingga letak geografis Indonesia sebagai negara tropis dengan berbagai macam keindahan alam hingga satwa. Pariwisata di negara Indonesia adalah aset yang penting dalam bidang ekonomi yang telah menyumbangkan produk domestik bruto (PDB). Hal ini dapat terjadi dikarenakan bagi setiap pengunjung asing dapat mengeluarkan biaya dengan nominal rata-rata 1.100-1.200 dollar AS per kunjungannya, serta menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan perkiraan bahwasanya hampir

⁴ Valentina Oki Yovita, KERJA SAMA INDONESIA – END CHILD PROSTITUTION IN ASIAN TOURISM (ECPAT) DALAM MENANGANI MASALAH EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI SEKTOR PARIWISATA INDONESIA,", 10.

9% dari keseluruhan total angkatan kerja nasional bekerja pada bidang pariwisata.⁵

Salah satu negara yang dijadikan sebagai tujuan dari wisata seks komersial ialah Indonesia, terdapat 7 provinsi di negara Indonesia yang menjadi tujuan utama dari setiap turis datang dan mencari kepuasan seksualnya. Berikut kumpulan provinsi yang dimaksud: Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, serta Nusa Tenggara Barat (NTB). Terdapat beberapa kasus seperti pada tahun 2017, seorang warga negara Italia bernama Bruno Gallo dituntut 7 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah atas kasus asusila korban dibawah umur atau pedofilia di Lombok. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara membujuk 3 orang anak untuk dibawa ke rumah kontrakannya di daerah perumahan permata kota, desa bug-bug, kecamatan lingsar, kabupaten lombok barat. Selanjutnya 3 orang anak tersebut mengalami kekerasan seksual di waktu yang berbeda. Setelah mengalami pelecehan, korban diberikan sejumlah uang kisaran 25-100 ribu rupiah.⁶

Kemudian terdapat kasus lain pada tahun 2020, dimana seorang pria asing berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS), Russ Albert Medlin ditangkap oleh aparat Polda Metro Jaya dikarenakan telah melakukan tindakan asusila dengan anak dibawah umur. Medlin ialah seorang buronan Federal Bureau of Investigation (FBI) dikarenakan terlibat dalam kasus yang sama. Penangkapan

⁵ Dany dan Anggun Putri Dewanggi, —STRATEGI KOMUNIKASI ECPAT INDONESIA UNTUK MEMERANGI PARIWISATA SEKS ANAK (PSA)," *Communication* 9, no. 2 (16 Oktober 2018): 127, https://doi.org/10.36080/comm.v9i2.735.

digilib.uinsa.ac.id digili

⁶ –Bruno Dituntut ⁷ Tahun Penjara," diakses 22 Juni 2023, https://radarlombok.co.id/bruno-dituntut-7-tahun-penjara.html.

pelaku dilakukan atas adanya laporan dari masyarakat sekitar dikarenakan kerap ada anak remaja perempuan yang keluar masuk dari sebuah rumah di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada hari Minggu, 14 Juni 2020, pelaku tersebut ditangkap oleh aparatur kepolisian di rumah itu yang lalu dilakukannya penyidikan serta berhasil untuk diamankan. Terdapat anak kecil yang berusia 15-17 tahun. Pihak Polda Metro Jaya mengamankan tiga anak perempuan dibawah umur tersebut yang dimana masing-masing berinisial SS, LF, dan TR. Mereka diketahui baru saja melayani nafsu bejat dari Russ dengan upah sebanyak dua juta rupiah per anak. Russ pun diketahui kerap merekam serta memotret dirinya bersama dengan anak-anak tersebut saat mereka melakukan tindak asusila. Russ ialah seorang pedofilia atau dapat dikatakan menyukai hubungan badan dengan anak dibawah umur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari FBI, pelaku sudah pernah dua kali didakwah selama berada di Amerika pada tahun 2006 hingga 2008. Pada saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan serta mengejar satu pelaku yang lain yaitu wanita yang berasal dari Indonesia dengan inisial A. ia berperan sebagai orang yang menyediakan jasa prostitusi anak di bawah umur. Atas perbuatannya, pelaku tersebut dikenai Pasal 76 jo Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Terkait dengan Perlindungan Anak. Dengan dikenai ancaman hukuman penjara paling singkat yakni lima tahun, dan paling lama yakni 15 tahun dengan disertai denda sebanyak lima milyar rupiah.

__

⁷ –Pedofil Buronan FBI Ini Lakukan Aksinya di Indonesia - Ayo Jakarta," diakses 22 Juni 2023, https://www.ayojakarta.com/jakarta-selatan/pr-76752377/Pedofil-Buronan-FBI-Ini-Lakukan-Aksinya-di-Indonesia?page=all.

Selain itu, seorang warga negara Amerika bernama Ahmad Lee pada tahun 2021 telah dideportasi oleh pihak imigrasi bandara Soekarno-Hatta atas dugaan terlibat kasus pedofilia. Penangkapan dilakukan setelah pihak imigrasi membaca red notice yang diterbitkan interpol saat memeriksa Ahmad Lee. Sebenarnya Ahmad Lee sudah menjalani hukuman pada tahun 2006 atas tindakan pedofilia di negaranya namun dikarenakan dari pihak interpol masih memasukkan namanya dalam daftar red notice, kantor imigrasi akhirnya mendeportasi Ahmad Lee.⁸

Sektor pariwisata yang semakin berkembang pesat dengan diiringi citra dari pariwisata negara Indonesia yang kian membaik di pandang dunia harus diimbangi dengan suatu tanggung jawab sosial pada masyarakat sebagai salah satu pihak yang memiliki dampak baik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Terkhusus peran anak yang menjadi lebih rentan akan mengalami kejahatan eksploitasi seksual. Dalam kode etik global (*Global Code Of Ethics For Tourism* (GCET) yang ditetapkan oleh United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mengungkapkan bahwasanya eksploitasi manusia pada segala bentuknya terkhusus secara seksual, terlebih jika berkaitan dengan anak-anak, hal ini bertentangan dari tujuan utamanya yakni adanya pariwisata serta bentuk pelanggaran terhadap praktik dalam bidang pariwisata. Dalam penelitian dari Global Study yang dilakukan oleh End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia dan ECPAT International

⁸ Muhammad Naufal, —WN Amerika yang Terjerat Kasus Pedofilia Dideportasi Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta," 22 Juni 2023, https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/28/22583781/wn-amerika-yang-terjerat-kasus-pedofilia-dideportasi-imigrasi-bandara?page=all.

ditemukannya praktik eksploitasi seksual anak di destinasi wisata seperti Jakarta, Bali, Batam, dan Medan.⁹

Indonesia termasuk kedalam 10 negara yang menjadi destinasi pariwisata seks. Indonesia merupakan tujuan utama dari pedofil di Asia Tenggara setelah sebelumnya yakni Thailand sebab penegakan hukum untuk sekarang disana lebih ketat. KPAI telah memberikan pengakuan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangatlah lemah, Undang-undang tidak memberikan perlindungan yang lebih untuk mengkriminalkan sindikat tersebut dengan sanksi pidana. 10 Studi yang dilakukan di negara Indonesia menunjukkan bahwasannya terdapatnya anak-anak dalam industri seks yakni disebab<mark>kan dari kelu</mark>arga yang miskin, anak-anak yang memperoleh perlakuan yang tidak baik maupun penindasan, bahkan ada dari mereka yang memperoleh kekerasan fisik maupun seksual dalam rumah sendiri sebelum dikirim ke sektor pariwisata untuk dieksploitasi. Lain pada itu, pengaruh dari media televisi yang menampilkan nilai komsumerisme serta gaya hidup masyarakat kota, yang dimana anak-anak yang berasal dari pinggiran kota maupun pedesaan belum mampu mempunyai nilai-nilai tersebut. Hal lainnya yakni disebabkan oleh situasi yang dimana anak-anak tersebut berada di daerah wisata yang rentan akan eksploitasi seksual dari pelaku kejahatan seksual. Akan tetapi, pemerintah belum serius untuk memerangi sektor pariwisata seksual anak di negara Indonesia yang mana dapat meningkatkan masalah tindak kejahatan

⁹ –Eksplorasi Kerja sama dengan Kementerian Pariwsata - ECPAT Indonesia," diakses 6 Desember 2022, https://ecpatindonesia.org/berita/eksplorasi-kerja sama-dengan-kementerian-pariwsata/.

¹⁰ —Indonesia Dibayangi Problem Serius Pariwisata Seks Anak," diakses 6 Desember 2022, https://www.vice.com/id/article/4aybew/indonesia-termasuk-negara-favorit-pedofil-di-asia.

seksual anak yang diobjekkan menjadi seorang pelacur, serta belum adanya tindakan yang konkrit dari pemerintah bagi pemulihan pada anak yang menjadi korban tindak kejahatan eksploitasi seksual ini.¹¹

Berbagai pertayaan kerap muncul terkait statistik serta jumlah PSA dari suatu media ataupun orang-orang yang perduli, akan tetapi untuk memperoleh jumlah yang akurat pada korban golongan anak ataupun wisatawan seks terhadap anak sangat sulit. Berbagai macam faktor yang membuat sulitnya data untuk didapatkan karena PSA merupakan sebuah kegiatan yang illegal oleh sebab itu sebagian besar PSA tersembunyi serta melibatkan kelompok kejahatan yang telah terorganisir, masih menjadi sebuah topik serta hal yang tabu diberbagai belahan dunia tentang PSA. Stakeholder banyak yang menyangkal keberadaan dari issu terkait, dikarenakan takut apabila issu terkait mendapat sorotan dengan begitu akan dapat berkesan yang negative terhadap daerah dengan tujuan wisata tersebut serta dapat menghalangi berkembangnya pariwisata. Selain itu banyak kasus PSA yang digolongkan sebagai suatu kejahatan seksual pada anak, pelacuran hingga pedofilia. 12

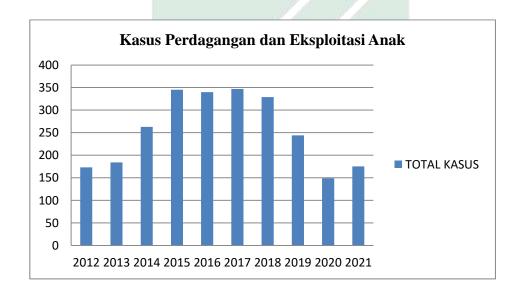
Pemerinah sebagai otortas tertinggi memiliki peran dalam suatu negara dalam menanggulangi permasalahan ESKA terkhusus PSA yang ditinjau masih belum optimal. Kebijakan serta dasar hukum yang ditentukan masih belum dilakukan dengan jelas, sehingga salah tafsir serta kebingungan pada masyarakat.

¹² Hidayat. Op. Cit.

¹¹ Rahmat Hidayat, —Kjan Situasi Dan Kondisi Anak Korban Pariwisata Seks Di Lingkungan Wisata Kota Makassar," Jurnal Politikom Indonesiana 4, no. 1 (25 Juli 2019): 202-18, https://doi.org/10.35706/jpi.v4i1.2002.

Penidakan yang diakukan belum secara serius pada pelaku ESKA dan belum dilakukan secara maksimal dengan begitu mereka dapat mengulangi tindakan ini dengan leluasa.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus perdagangan dan eksploitasi anak di Indonesia telah menunjukkan tren yang turun sepanjang sejak 2017-2020. Namun, pada tahun 2021 angkanya kembali naik, terdapat 340 kasus perdagangan dan eksploitasi anak yang terjadi pada tahun 2016. Jumlah tersebut sempat mengalami peningkatan menjadi 347 kasus di tahun 2017, kemudian turun kembali hingga mencapai 149 kasus di tahun 2020. Tidak sampai disini, perdagangan dan eksploitasi anak kembali mengalami peningkatan pada 2021 yang salah satu penyebabnya yaitu karena pandemi Covid-19.



Grafik 1. Jumlah Kasus Perdagangan dan Eksploitasi anak di Indonesia Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)¹³

¹³ kepada Ruri Wijareni, Permintaan Data KPAI," 11 November 2022.

Pertama kali ECPAT dibentuk oleh para peneliti dibantu oleh para aktivis yang berjuang dalam sektor hak terhadap anak guna menghilangkan -wisata seks" dengan titik fokus penelitian awal yakni di Asia terutama daerah Thailand. Pembentukan ECPAT dimulai tahun 1990 sebagai wujud dari kampanye guna menghilangkan prostitusi terhadap anak pada bidang wisata Asia. Sejak masa itu, organisasi ini terus mengalami perkembangan dengan membangun organisasi yang unik, memperluas cakupan geografis maupun berbagai pengalaman dengan cara advokasi di tingkat nasional, regional, hingga tingkat internasional untuk mengumpulkan data, penelitian, serta analisis dengan kualitas tinggi. Pada tahun 1996 ECPAT mulai menjalin kerja sama dengan UNCEF serta kelompok LSM Child Rights Connect. ECPAT International bersama-sama menyelenggarakan kongres global dengan menentang eksploitasi anak di bawah umur, pelaksanaan dilakukan di Stockholm, Swedia. Pemerintah Swedia lah yang menyelenggarakan kongres tersebut yang juga berperan dalam memperoleh dukungan serta partisipasi dari pemerintah yang lain. Dengan begitu ECPAT yang sebelumnya hanyalah gerakan kampanye, kini menjadi instansi yang menyebar ke segala penjuru dunia. 14

ECPAT di Indonesia sendiri mulai di bentuk pada tahun 2000-an oleh sejumlah organiasasi dan orang profesional dengan komitmen untuk menjalin kerja sama melawan tindak eksploitasi seksual terhadap anak. Mulai tahun 2005 jaringan dari kolaborasi dengan ECPAT Internasional yang terdapat di 98 negara di dunia dan mempunyai kesamaan tujuan guna menghilangkan tindak eksploitasi

¹⁴ Ramlan, — Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak" (ECPAT Indonesia, 2006).

seksual terhadap anak. Sejak tahun 2012 jaringan terdaftar sebagai ECPAT Indonesia serta menjadi anggota resmi dari ECPAT Internasional. ECPAT Indonesia merupakan jaringan nasional yang terdiri dari 22 organisasi anggota serta 2 individu di 11 provinsi yang melakukan kerja sama guna menghapus prostistusi, pornografi, dan perdagangan anak dengan tujuan seksual. ECPAT Indonesia secara aktif memiliki keterlibatan dalam implementasi berbagai inisiatif yang dimana bermaksud menangani issu utama di tigkat nasional hingga tingkat regional.¹⁵

INGO/NGO seperti ECPAT dalam menyuarakan kepentingannya yakni dalam hal penegakkan hak terhadap anak, proses yang diterapkan tidak luput dari terlibatnya banyak pihak yang tergolong secara sistematis serta memiliki korelasi. Dalam permasalahan di Indonesia, ECPAT yang bergerak dalam penghapusan eksploitasi anak dalam dunia pariwisata seks anak dalam melaksanakan tugasnya ECPAT melakukan kerja sama dengan instansi Yayasan Ibu dan Anak, Committee Against Sexual Abuse, jaringan ECPAT Internasional, serta para individu-individu yang sedang berjuang dalam menegakkan hak terhadap anak, ECPAT pun melaksanakan penggalangan dana dengan bentuk pencarian sponsor guna melaksanakan tugas dengan baik. Dana tersebut digunakan guna membayar para pembicara, konsumsi, pembuat laporan, logistik, dan lain sebagainya. Dalam

¹⁵ —Tentang Kami - ECPAT Indonesia," diakses 14 Maret 2023, https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/.

hal tersebut ECPAT berhasil dalam mengajak kumpulan-kumpulan orang maupun instansi lainnya guna bekerja sama dengannya.¹⁶

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dijawab pada penelitian ini yaitu, —bagaimana peran ECPAT Indonesia dalam membantu Pemerintah Indonesia mengatasi kejahatan pariwisata seks anak?".

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian, penelitian ini mempunyai tujuan guna dapat mengetahui bagaimana peran ECPAT Indonesia dalam membantu Pemerintah Indonesia mengatasi kejahatan pariwisata seks anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini yakni diharapkan dapat menambah wawasan sekaligus pengetahuan terutama dalam studi hubungan internasional berkaitan dengan perilaku INGO serta hubungannya dengan suatu negara.

2. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini ditargetkan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada Pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat memberi dampingan pada korban yang memiliki keterlibatan dalam kasus pariwisata seks anak, serta memberi bantuan pada pemerintah dalam melakukan proses penanganan kasus. Selain itu, hasil

¹⁶ Baghas Wahyudha, -PERAN ECPAT (END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES) DALAM MENGATASI CHILD SEX TOURISM DI INDONESIA,".

penelitian ini juga memberikan kampanye anti pariwisata seks anak kepada masyarakat agar lebih waspada dan menghindari permasalahan pariwisata seks anak.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 10 literatur. Penelitian mengenai peran ECPAT sudah pernah dilakukan oleh dua peneliti sebelumnya, walaupun berbeda sudut pandang dengan apa yang akan peneliti tulis. Penelitian pertama ditulis oleh Aisyah Fitri Yana yang berjudul Peran End Child Trafficking In Asian Tourim (ECPAT) Dalam Menanggulangi Child Trafficking Di Indonesia (2009-2012)". Dalam penelitian ini Aisyah menyebutkan beberapa faktor terjadinya perdagangan anak diantaranya, kurangnya kesadaran akan bahaya perdagangan manusia, kemiskinan yang menyebabkan imigrasi, pekerjaan palsu, kurangnya pendidikan, pernikahan palsu, dll. Perdagangan anak di Indonesia terus berkembang, sehingga pemerintah melakukan upaya dengan bekerja sama dengan ECPAT dalam mengatasi perdagangan anak di Indonesia. Advokasi merupakan program yang sering dilakukan oleh ECPAT Indonesia dan beberapa organisasi pemberantasan perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial. Kemudian juga dilakukan kerja sama dengan The Body Shop dalam kampanye 'Stop Sexual Children Trafficking and Youth Trafficking'. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran ECPAT. Hasil yang diperoleh adalah adanya aksi yang dilakukan oleh ECPAT dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual komersial anak melalui upaya kerja sama antar instansi pemerintah yang juga makin banyak bergabung dengan ECPAT.¹⁷ Penelitian ini sudah menjelaskan bagaimana kolaborasi ECPAT dengan pemerintah Indonesia namun berfokus pada masalah perdagangan anak berbeda dengan fokus yang akan dilakukan peneliti yaitu tentang kejahatan Pariwisata Seks Anak.

Adapun penelitian menurut Dany dan Anggun Putri Dewanggi yang berjudul –Strategi Komunikasi ECPAT Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (PSA)". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya ECPAT Indonesia melakukan kerja sama dengan beberapa mitra seperti Perhimpunan Hotel Indonesia (PHRI), Perhimpunan Perwakilan Wisatawan Indonesia (ASPPI), Taksi Putra sebagai Layanan Antar Jemput, PT Angkasa Pura II dan Accor Group Hotel. Dibangunnya kolaborasi ini dengan menggunakan model komunikasi advikasi John Hopkin. Membangun program –Down To Zero" dengan mitra koalisi, terutama selama fase mobilisasi dan aksi. Melihat permasalahan Pariwisata Seks Anak yang kompleks, ECPAT Indonesia berusaha menjalin kemitraan dengan berbagai pihak salah satunya sektor swasta industri pariwisata guna memerangi kasus PSA di Indonesia. Penelitian ini hanya membahas strategi komunikasi ECPAT dalam membangun kemitraan dengan bidang swasta industri pariwisata, tetapi tidak disebutkan bagaimana kolaborasi ECPAT dengan Pemerintah Indoensia untuk mengatasi kejahatan Pariwisata Seks Anak.

٠

¹⁷ Aisyah Fitri Yana, —PERAN END CHILD TRAFFICKING IN ASIAN TOURIM (ECPAT) DALAM MENANGGULANGINCHILD TRAFFICKING DI INDONESIA (2009-2012)" 1, no. 2 (2014).

^{2012)&}quot; 1, no. 2 (2014).

18 Dany dan Putri Dewanggi, —\$RATEGI KOMUNIKASI ECPAT INDONESIA UNTUK
MEMERANGI PARIWISATA SEKS ANAK (PSA)."

Penelitian terkait kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak tercatat sudah pernah dilakukan oleh Rahmat Hidayat, dengan konteks penelitian yang berbeda. Penelitian pertama membahas mengenai —Bentuk-bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan wisata Provinsi Sulawesi Utara." Dalam penelitian tersebut dijelaskan semakin maraknya bentuk dari eksploitasi seksual komersial anak di lingkup pariwisata Sulawesi Utara, dimana prostitusi merupakan salah satu bentuk eksploitasi seks komersial anak yang paling banyak terjadi di wilayah ini, namun peraturan perundang-undangan belum memadai guna menangani kasus kekerasan pada anak-anak di Indonesia terkhusus di Kota Manado Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan latar belakang Korban Eksploitasi Seksual komersial yang belum terkuak. Dalam penelitian ini ditemukan adanya bentuk-bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Lingkungan Pariwisata Sulawesi Utara seperti, Pelacuran anak, Pornografi anak, perdagangan anak guna maksud dari prostitusi, serta Transformasi budaya maupun Agama. ¹⁹

Sedangkan, pada penelitian kedua, Rahmat Hidayat Membahas mengenai Situasi maupun Kondisi Anak Korban Pariwisata Seks di Lingkungan Wilayah Kota Makasar. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai kondisi korban pariwisata seks anak (PSA) yang menjadi sorotan di berbagai golongan dengan keseluruhan dari jumlah kasus yang tiap tahunnya meningkat secara signifikan. Walaupun belum ada jumlah eksploitasi yang pasti pada daerah Makassar, namun

¹⁹ Rahmat Hidayat, — KAJIAN BENTUK- BENTUK EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI LINGKUNGAN WISATA PROVINSI SULAWESI UTARA," *Sosiohumaniora* 17, no. 3 (2 April 2015): 237, https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8342.

diduga perkembangan Eksploitasi Seks Komersial Anak semakin memprihatinkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan upaya wawancara yang dilakukan pada penduduk setempat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, pengelola industri usaha, mucikari/germo, serta korban pariwisata terhadap seks anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ratarata anak yang menjadi korban ESKA berasal dari tentang usia 16-18 tahun, anak Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan diantaranya hanya menempuh jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Banyaknya anak yang menjadi korban ESKA khususnya Pariwisata Seks Anak disebabkan oleh latar belakang anak yang berasal dari keluarga miskin, anak-anak yang mengalami penindasan, paksaan hingga penipuan.²⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat berbada dengan apa yang akan peneliti tulis. Dari kedua penelitian diatas tidak dijalaskan secara rinci bagaimana upaya dalam mengatasi kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak khususnya pariwisata seks anak di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Penelitian mengenai langkah Pemerintah Indonesia dalam menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) telah diteliti oleh tiga peneliti sebelumnya. Penelitian pertama ditulis oleh Merita Putri Septia dengan judul — Upaya Indonesia Dalam Penanganan Kasus Pedofilia Internasional Di Pulau Bali". Penelitian ini menjelaskan bahwa Bali merupakan salah satu tujuan wisata favorit baik domestik maupun internasional sehingga perlu penanganan khusus dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian dilakukan menggunakan

²⁰ Hidayat, –Kajian Situasi Dan Kondisi Anak Korban Pariwisata Seks Di Lingkungan Wisata Kota Makassar."

metode kualitatif deskriptif dalam menggambarkan latar belakang kasus pedofilia pelecehan seksual di Bali yang menduduki peringkat pertama sebagai provinsi di Indonesia yang memiliki kasus pedofilia tertinggi, dibuktikan dengan lebih dari 300 kasus terjadi di Bali. Kemudian digunakan Teori Normatif Hubungan Internasional untuk menggambarkan hubungan antara norma-norma yang sesuai dan hubungannya dalam menciptakan undang-undang tentang masalah tersebut. hasilnya, Indonesia telah melakukan berbagai upaya baik internal maupun eksternal. Indonesia telah melakukan upaya internal untuk mengatasi masalah ini melalui Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia 2002. Indonesia juga memiliki hubungan yang terkoordinasi dengan baik antara kepolisian, imigrasi, dan lembaga perlindungan anak. Secara eksternal, Indonesia bekerja sama dengan Interpol melalui Polri untuk memfasilitasi pertukaran informasi untuk mengungkap kasus-kasus pelecehan seksual anak yang kompleks.²¹

Selanjutnya penelitian dari Rusmilawati Windari tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global-Local Based Approach (Globalization). Rusmilawati menjelaskan bahwa globalisasi membawa dampak negatif pada banyak bidang kehidupan manusia. Kemajuan dalam bisnis, pariwisata, teknologi informasi, transportasi dan hiburan telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam eksploitasi seksual komersial yang melibatkan jutaan perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini permasalahan hukum yang diangkat dianalisis melalui pendekatan hukum dan konseptual, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian

²¹ Merita Putri Septia, Jalan H Soedarto, dan Kotak Pos, —UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN KASUS PEDOFILIA INTERNASIONAL DI PULAU BALI,".

dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasilnya diketahui bahwa pencegahan ESKA di Indonesia secara normatif telah mengadopsi pendekatan berbasis globallokal. Di tingkat global, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi dan protokol opsional yang relevan, serta menjalin kerja sama bilateral atau multilateral. Sementara itu, beberapa undang-undang terkait, khususnya undang-undang perlindungan anak dan anti-perdagangan orang, diberlakukan di tingkat lokal untuk mencegah eksploitasi sek sual komersial anak, juga dilengkapi dengan undang-undang perlindungan korban dan saksi.²²

Adapun penelitian menurut Jimgga Irawan dan Ridha Amalia tentang Upaya Indonesia Mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Industri Pariwisata dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Penelitian ini menjelaskan bahwa sejak jaman dulu negara-negara yang ada di dunia sudah melihat adanya bahaya tentang perbudakan manusia, dimana ini dibuktikan dengan maraknya kasus yang terjadi. ESKA sendiri dapat dikaitkan dengan kasus perbudakan tersebut, yang mana ini menyangkut dengan hak asasi manusia dan sangat memprihatinkan, maka dari itu berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk menangani ESKA. Sebelum mengarah pada upaya-upaya yang dapat dilakukan, pada penelitian dijelaskan terlebih dahulu apa saja analisa yang dapat dikaitkan dengan permasalah ESKA, dimana analisanya didasari atas konsep keamanan manusia, konsep rezim internasional, konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini digunakan jenis dan pendekatan

²² Rusmilawati Windari, —Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization)," *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 282, https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369.

kualitatif-deskriptif. Penyebab utama ESKA di Indonesia didasari oleh masalah ekonomi dan pendidikan seks yang kurang, maka dari itu pemerintah Indonesia sangat mengupayakan hal-hal yang notabenenya dapat mengurangi tingkat ESKA di Indonesia. Upaya yang dilakukan meliputi pencanangan Kota Layak Anak (KLA), pecinta wisata pedesaan ramah anak dengan bebas dari eksploitasi, penetapan peraturan Perundang-Undangan, dan yang terakhir pengetatan aturan izin datang dan tiggal warga negara asing. Program yang telah dibuat tersebut dilaksanakan berdasar pada optional protocol to the convention on the rights of the child on the sale of childern, child prostitution and child phornography (OPSCO). Sedangkan upaya yang telah dilakukan pemeritah Indonesia selaras dengan prinsip keamanan manusia demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.²³ Dari ketiga penelitian tersebut diatas telah menjelaskan dengan rinci berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kejahatan eksploitasi seksual komersial anak, tetapi tidak menyentuh adanya penan ECPAT sebagai INGO guna membantu pemerintah Indonesia mengatasi kasus ESKA didalamnya.

Penelitian tentang apa saja hambatan serta hal yang telah dicapai pemerintah Indonesia dalam Menangani kejahatan Eksploitasi Seksual Anak tercatat pernah dibahas oleh dua peneliti sebelumnya. Penelitian pertama ditulis oleh oleh Yahya Muhammed Bah yang berjudul —Combating Child Abuse In Indonesia: Achievements And Challenges". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa

²³ Jingga Irawan dan Ridha Amaliyah, —UPAYA INDONESIA MENGURANGI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI INDUSTRI PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030" 9 (2022): 14.

di seluruh dunia anak-anak mengalami pelecehan dan membutuhkan upaya bersama di semua tingkatan untuk menghentikannya, karena setiap anak berhak atas perlindungan penuh. Indonesia telah membuat langkah besar dalam kesadaran publik, reformasi hukum dan kebijakan, pembangunan kapasitas, penyediaan layanan reintegrasi, penandatanganan perjanjian ekstradisi, dan pengembangan perangkat lunak komputer. Tetapi meskipun demikian, bangsa ini juga dihadapkan pada banyak kendala yaitu, undang-undang nasional yang tidak memadai, rendahnya kesadaran akan hak-hak anak, alokasi anggaran yang rendah, kelangkaan data, campur tangan agama dan budaya, tenaga terlatih yang tidak memadai, terbatasnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban, aparat keamanan dan peradilan yang kurang memahami perangkat hukum perlindungan anak, norma dan praktik sosial yang buruk, penyangkalan terjadinya kekerasan terhadap anak, kurangnya pelaporan, sifat manipulatif pelaku, keinginan keluarga untuk melindungi citra mereka daripada melaporkan pelecehan anak, dianggap sebagai masalah pribadi, serta sistem dan prosedur pelaporan yang tidak dipahami.²⁴ Dalam penelitian ini tidak dijelaskan tentang kolaborasi Pemerintah dengan INGO untuk mengatasi kejahatan seksual komersial anak.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Silvia Novi tentang hambatan pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam melakukan penanganan pada kasus pariwisata seks anak dengan melalui RAN PTPPO serta ESKA. Penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di Asia setelah Thailand dalam kasus pariwisata seks anak. Situasi akan meningkat setiap tahun

²⁴ Yahya Muhammed Bah, —COMBATING CHILD ABUSE IN INDONESIA: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES,".

karena para turis bermigrasi dari Thailand ke Indonesia, sejak Thailand menerapkan amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak di negara mereka. Kondisi tersebut membuat penelitian ini dibuat untuk mengetahui hambatan dari upaya Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam menyelesaikan kejahatan pariwisata seks anak melalui Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) dan ESKA. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan teori aksi kolektif, teori implementasi kebijakan, dan metode penjelasan, peneliti menemukan adanya kendala dalam implementasi RAN PTPPO dan ESKA. Hambatan tersebut datang dari kelompok masyarakat yang menyalahgunakan sistem, dimana kelompok masyarakat tersebut membantu wisatawan mendapatkan anak, atau mereka menjual perempuan dan anak-anak tersebut dengan alasan memberi mereka pekerjaan. Hambatan juga datang dari implementasi kebijakan, dimana tidak ada standar regulasi yang jelas, target dalam kebijakan tidak komprehensif, dan buruknya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.²⁵ Dalam penelitian ini belum ditemukan adanya pembahasan secara mendalam terkait dengan peran ECPAT dalam upaya membantu pemerintah Indonesia guna mengatasi kejahatan seksual khususnya di sektor pariwisata.

Penelitian terkait eksploitasi seks anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sudah pernah diteliti oleh Fredi Yuniantoro sebelumnya dengan judul –Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam Peraturan Perundang-Undangan". Dalam penelitian ini dijelaskan eksploitasi seksual sebagai bentuk kesusilaan dimaksud adalah aktivitas yang

²⁵ Silvia Novi, —IAMBATAN PEMERINTAH INDONESIA DAN ECPAT DALAM MENANGANI PARIWISATA SEKS ANAK MELALUI RAN PTPPO DAN ESKA,".

menggambarkan pencabulan hingga melanggar norma. Ketetapan pidana yang berkaitan dengan eksploitasi seksual terdapat dalam Pasal 296 dan 506 KUHP, Pasal 4 dan 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, serta Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Jika diantara aturan tersebut terdapat aturan umum hingga khusus, dengan begitu yang digunakan yakni aturan khusus dengan ancaman paling berat pada Asas Concursus Idealis. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menerapkan Undang-undang, kasus serta konseptual. Dengan demikian, menurut pasal 296 dan 506 KUHP dapat dipidana barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan cabul dengan orang ke tiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dan atau sumber penghasilan adalah unsur esensial dari kejahatan," bahwasannya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa dengan adanya unsur ini, objek dalam pasal ini dapat berupa orang dewasa atau yang belum dewasa." Perbuatan yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 terkait Pornografi diadukan dapat melakukan live action secara langsung dan tidak secara langsung. Apabila secara langsung biasanya ditemukan di tempat hiburan malam atau disebut night club hingga karaoke bebas, jika tidak langsung seperti dilakukan menggunakan media komunikasi via online. Sedangkan unsur perbuatannya dinyatakan pada pasal 1 ayat 8 adalah -bentuk pemanfaatan organ tubuh oleh orang lain terhadap korban untuk tujuan seksual agar mendapatkan keuntungan, namun kegiatan tersebut tidak terbatas pada pelacuran dan pencabulan."Dalam pasal 2 ayat 1 da 2 memiliki maksud dalam pasal ini yakni

—perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfatkan korban untuk tujuan seksual dan diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan dari kegiatan hasil eksploitasi seks." Penelitian ini hanya berfokus pada bentuk kejahatan seksual yang diatur diberbagai pasal dala Undang-undang namun tidak menyebutkan mengenai adanya peran pemerintah maupun INGO dalam penanggulangan masalah eksploitasi seksual komersial.

F. Argumentasi Utama

Dalam penelitian dengan judul "Peran End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) Indonesia dalam Membantu Pemerintah Indonesia Mengatasi Kejahatan Pariwisata Seks Anak", peneliti berargumen bahwa ECPAT sebagai organisasi yang berfokus pada hak anak memiliki beberapa peran untuk menanggulangi masalah pariwisata seks anak diantaranya yaitu sebagai pelaksana, katalis dan mitra.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini, yakni:

Bab I adalah pendahuluan, bab ini bersi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka (literature review), argumentasi utama, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II yaitu kerangka konseptual. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai konsep-konsep yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis hasil

.

²⁶ Fredi Yuniantoro, —EKSPLOITASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (20 April 2018), https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227.

pembahasan. Landasan konseptual yang akan digunakan oleh peneliti di sini diantaranya adalah konsep peran, International Non-Governmental Organization (INGO), End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), dan Pariwisata Seks Anak.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini akan membahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis pertanyaan penelitian deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan subjek dan peringkat analisis, teknik sampling, selanjutnya teknik pengumpulan data dimana peneliti menggunakan teknik pengupulan data berupa dokumentasi dan wawancara, dan dilanjutkan dengan teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data, lokasi dan waktu penelitian, juga tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah pembahasan. Pada bab ini akan berisi penyajian dan analisis data. Peneliti akan menjabarkan data maupun informasi yang telah ditemukan. Setelahnya, peneliti akan melakukan analisis data dengan konsep yang telah dipilih sebelumnya. Pada bab ini pula peneliti akan menjawab pertanyaan dari fokus penelitian yang telah diajukan.

Bab V merupakan bagian penutup. Peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian akhir ini juga akan memuat saran.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. Peran INGO

Peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memberi batasan pada suatu organsasi atau orang untuk melakukan kegiatan berdasar pada tujuan serta ketentuan yang dilakukan melalui kesepakatan bersama supaya dapat dilakukan dengan optimal.²⁷ INGO berperan salah satunya untuk menyediakan sarana kerja sama antar negara dalam berbagai sektor, sebagaimana kerja sama tersebut dapat memberi keuntungan bagi sebagian besar maupun seluruh anggotanya.

Dalam Perwita & Yani, menyatakan bahwasannya —peran organisasi internasional diantaranya sebagai wadah atau forum untuk menggalang kerja sama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota)." Selanjutnya yakni sebagai sarana guna merundingkan serta menghasilkan keputusan bersama yang dimana saling memberi keuntungan. Lalu yang terakhir merupakan instansi yang mandiri guna menerapkan aktivitas yang perlu seperti kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan, bantuan dalam melestarikan lingkungan hidup, *peace keeping operation* dan sebagainya.²⁸

Untuk mengetahui peranan suatu INGO menurut David Lewis dan Nazneen Kanzi, dapat dilakukan dengan menganalisis kegiatan yang dilakukan INGO itu sendiri. Dalam bukunya yang berjudul *The Management of Non Governmental Organizations and Development*, dikatakan bahwa INGO memiliki

²⁷ Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong, dan Joorie M Ruru, —PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA TOMOHON,".

²⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).

tiga rangkaian kegiatan utama yang dilakukan dan dapat didefinisikan sebagai peran, yaitu *implementers, catalyst* dan *partners*. INGO bisa hanya melakukan salah satu peran saja, namun juga dapat melakukan ketiga peranan tersebut secara bersamaan.²⁹

- Implementers (Pelaksana). Dapat didefinisikan sebagai penyaluran sumber daya untuk penyediaan barang dan jasa yang menjadi bagian dari proyek atau program baik dari INGO yang sama, pemerintah ataupun lembaga lainnya. Peran ini banyak dilakukan oleh INGO guna memberikan bantuan berupa layanan langsung kepada orang yang membutuhkan (seperti memberikan perlindungan, perawatan kesehatan, pinjaman, bantuan di bidang ekonomi lainnya, penyuluhan pertanian, nasihat hukum, atau bantuan darurat). Pelayanan juga dapat dilakukan atau diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk pencegahan misalnya berupa kampanye, sosialisasi serta pelatihan.
- Catalysts (Katalis). Peran katalis diartikan bahwa INGO dapat menjadi agen yang mampu membawa perubahan, baik melalui advokasi maupun inovasi untuk menemukan solusi baru terhadap suatu isu. Juga didefinisikan sebagai kemampuan INGO untuk mengubah pola pikir dan menginspirasi aktor lain.
- Partners (Mitra). INGO sebagai mitra, melakukan kerja sama dengan aktor lain, baik itu pemerintah maupun sektor swasta dimana kedua belah pihak berbagi manfaat dan risiko dalam kerja sama. Kerja sama yang

²⁹ David Lewis, *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction*, 2nd ed (Florence: Taylor and Francis, 2004).

terjalin antara INGO dengan pemerintah dapat membantu pemerintah untuk mengatasi suatu masalah tertentu dimana terkadang program atau kebijakan pemerintah tidak berjalan dengan baik.

B. INGO (International Non-Governmental Organization)

Interaksi dalam dunia internasional saat ini tidak hanya didominasi bagi negara, namun telah banyak peran lain yang turut melakukan usaha peningkatan interaksi satu dengan lainnya demi mencapai kepentingan masing-masing. Sebagaimana hal itu aktor negara maupun non-negara pada hakikatnya kerap masuk dalam beberapa institusi internasional yang berfungsi sebagai tempat pancapaian kepentingan. Anggota-anggota institusi internasional di dalamnya ialah peran non-negara yang dikenal dengan International Non-Governmental Organization (INGO). Peran organisasi ini untuk sekarang tidak dapat dipandang sebelah mata, hal tersebut disebabkan telah banyak peranan INGO yang terbukti dapat memperbaiki situasi di beberapa negara di dunia. Untuk pemilihan anggota dalam INGO lebih cenderung sukarela sehingga seseorang yang tertarik dengan suatu fokus INGO, seorang tersebut dapat masuk didalam dengan memberikan dana partisipasi secara sukarela. INGO dapat didefenisikan sebagai salah satu organisasi yang beranggotakan non-state actor ataupun non-governmental actor dengan konektivitas lintas batas negara.

³⁰ Resa Rasyidah, —INGO Sebagai Agent of Aid: Peran dan Kontribusi Oxfam Internasional dalam Penyaluran Bantuan untuk Pengentasan Kemiskinan," 2014.

C. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of **Children for Sexual Purposes**)

ECPAT merupakan INGO yang mempunyai visi menciptakan dunia bagi anak-anak yang bebas dari segala macam kejahatan yakni eksploitasi seksual komersial serta misi guna membentuk jaringan secara global sebagaimana meliputi individu serta organisasi yang bekerja sama guna memberantas prostitusi anak, pornografi anak hingga penjualan anak. ECPAT terbentuk pada tahun 1996, dengan sekretariat internasional yang berbasis di Bangkok, badan tersebut menyalurkan bantuan teknis guna memberi dukungan pada anggota ECPAT serta melakukan penelitian, advokasi maupun aksi nyata guna memberi perlindungan bagi anak-anak dari commercial sexual exploitation of children (CSEC).³¹

Sebagai bagian dari jaringan ECPAT Internasinal, ECPAT Indonesia ialah sebuah organisasi jaringan tingkat nasional yang bekerja sama dengan 19 organisasi terdapat pada 11 provinsi di negara Indonesia guna menolak adanya eksploitasi seksual terhadap anak (ESKA) yang dimana terdiri dari perdagangan seks terhadap anak, pelacuran anak, pornografi anak, eksploitasi seksual terhadap anak di sekitar tempat wisata, prostitusi *online* terhadap anak, pernikahan terhadap anak, dan lain sebagainya. ECPAT di Indonesia memiliki komitmen guna menguatkan aksi nasional guna upaya mencegah terjadinya ESKA dengan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak yakni organisasi masyarakat sipil,

³¹ Eka Mulyani Lestari dan I Made Anom Wiranata, PERAN ECPAT DALAM MENANGANI CSEC OLEH WISATAWAN ASING DI THAILAND,", 8.

instansi pemerintah, akademisi, sektor pariwisata, internasional, maupun sektorsektor lain yang relevan.³²

D. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks terhadap anak yakni eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang dilakukan oleh oknum yang sedang menempuh perjalanan ke suatu tempat kemudian melakukan hubungan seksual dengan mereka di sana. Sebagian besar aktor berasal dari negara kaya yang sedang bepergian ke negara berkembang maupun negara miskin. Namun, adapun wisatawan seks anak yang berasal dari dalam negeri atau wilayah itu sendiri, dan pelakunya kebanyakan dari orang yang mempunyai finansial yang cukup. ³³

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), yakni salah satu kegiatan kriminal tercepat dalam berkembang serta paling menguntungkan di dunia. Perbudakan global anak-anak mempengaruhi korban yang tak terhitung jumlahnya yang diperdagangkan di negara asal mereka ataupun diangkut jauh dari rumah mereka hingga diperlakukan sebagai komoditas guna diperjual-belikan sebagai tenaga kerja ataupun eksploitasi seksual. Di seluruh dunia, anak perempuan yang paling mungkin guna diperdagangkan ke dalam perdagangan seks: mencapai 98% dari mereka yang diperdagangkan guna ESKA. Kemudian, standar kesehatan serta keamanan dilingkungan eksploitasi umumnya sangat rendah, hingga tingkat kekerasan yang dialami bisa berakibat pada perkembangan fisik, psikologis, serta sosial-emosional anak. Pendekatan berbasis hak asasi

³² —Tentang Kami - ECPAT Indonesia."

³³ — Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak."

manusia teruntuk eksploitasi seksual komersial anak yakni kerangka konseptual yang komprehensif sebagaimana fokus korban serta respon penegakan hukum mampu dikembangkan, diterapkan, hingga di evaluasi.³⁴



³⁴ Yvonne Rafferty, — Child Trafficking and Commercial Sexual Exploitation: A Review of Promising Prevention Policies and Programs.," *American Journal of Orthopsychiatry* 83, no. 4 (2013): 559–75, https://doi.org/10.1111/ajop.12056.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pertanyaan deskriptif, guna memahami terkait fenomena yang sedang dialami oleh subyek penelitian kemudian dideksripsikan dalam bentuk kata-kata dengan metode ilmiah. Metode kualitatif yakni membantu ketersediaan dalam deskripsi atas kejadian, informasi yang rinci, gambaran yang kompleks, serta mendorong pemahaman terkait dengan substansi dari adanya suatu peristiwa.³⁵

Dikarenakan penelitian ini membutuhkan penjelasan yang tidak memerlukan data berupa perhitungan ataupun angka melainkan lebih membutuhkan penjelasan berupa kata-kata dan bahasa untuk itulah jenis penelitian kualitatif dipilih. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menekankan penjelasan bersifat analisis deskriptif maupun naratif dalam penyajian data-datanya. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian sosial yang membutuhkan keterangan berupa peristiwa, tindakan serta interaksi sosial yang bersifat alamiah dalam pengambilan data subjek yang diteliti.

B. Subjek dan Peringkat Analisis

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah ECPAT Indonesia. Sedangkan, peringkat analisis yang digunakan yaitu tingkat kelompok, karena

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021).

fokus penelitian kepada perilaku yang telah dilakukan oleh organisasi nonpemerintah (NGO).³⁶

C. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang diterapkan yakni purposive sampling. Dimana purposive ialah teknik mengambil sampel terhadap sumber data dengan pertimbangan tertentu. Hal ini, seperti orang tersebut yang di anggap paling mengerti atas apa yang kita butuhkan, atau ia sebagai pentinggi sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasi sosial. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu guna mengetahui bagaimana peran ECPAT Indonesia dalam membantu Pemerintah mengatasi kejahatan PSA.

D. Teknik Pengumpulan Data

- 1. Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data dengan mengolah berbagai manuskrip baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis guna menunjang data penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokemen, jurnal, buku, makalah, artkel/berita, juga website-website resmi yang terakurasi, maupun bantuan dari fasilitas yang telah disiapkan oleh kampus seperti http://digilib.uinsby.ac.id/, yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
- 2. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab antara dua pihak untuk mendapatkan informasi sebagai penunjang data penelitian. Narasumber atau informan dalam wawancara yang dilakukan oleh

³⁶ Mohtar Mas'oed, *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990).

peneliti ialah Bapak Andy Ardian yang sebagai Program Manager ECPAT Indonesia.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah usaha mencari hingga menata catatan hasil wawancara dan lain sebagainya guna memberi peningkatan pada hasil pemahaman peneliti terkait kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan bagi pembaca.³⁷ Dalaman penelitian ini peneliti mengenakan model interaktif oleh Miles dan Huberman sebagai berikut:³⁸

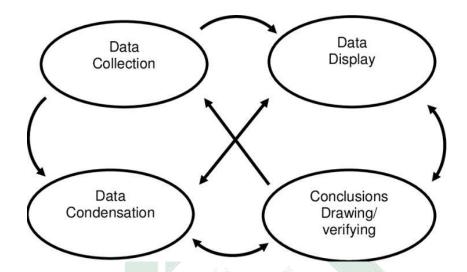
- a. Pengumpulan Data, dilakukan dengan mencari data dari beberapa sumber, seperti melalui dokumentasi dan wawancara yang kemudian dituangkan ke dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen, gambar, dan lainnya. Pengumpulan data pada penelitian ini yakni melalui wawancara, dokumen, buku, jurnal, serta website.
- b. Kondensasi data, merupakan proses dimana data yang terdapat dari catatan di lapangan baik tertulis, transkrip wawancara, makalah, literatur empiris, serta lain sebagainya. Maka dilakukan suatu penyederhanaan, pemilihan, abstraksi, transformasi data, dan pemfokusan. Kegiatan ini dilakukan dengan proses memadatkan data, memiliki artian bahwasanya hal ini memperkuat data dan menjauhi penyusutan data pada prosesnya. Kondensasi data terjadi sebelum benar-benar terkumpul keseluruhan data, kondensasi antisipatif dataterjadi jika

³⁷ Ahmad Rijali, — ANALISIS DATA KUALITATIF," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81, https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374.

³⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, —Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook," kedua (United Kingdom: SAGE Publication.).

peneliti memutuskan kerangka konseptual yang akan diterapkan, pertanyaan penelitian yang akan ditanyakan, terkait kasus yang hendak diteliti, serta menggunakan metode penelitian yang seperti apa.

- c. Penyajian data, merupakan data yang telah dipilih dalam bentuk gambaran umum hasil analisis yang dikerjakan agar dapat memahami informasi terkait topik yang diteliti, sehingga menimbulkan kemungkinan akan adanya mengambil kesimpulan serta mengambil tindakan. Bentuk penyajian data penelitian kualitatif yakni teks berbentuk naratif dari hasil lapangan. Penyajian data informasi yang diperoleh di lapangan digabungkan serta disusun menjadi suatu korelasi guna rencana kedepannya.
- d. Verifikasi hingga penarikan kesimpulan, merupakan proses penarikan arti data yang telah ditampilkan. Menarik kesimpulan ini dilakukan secara continue oleh peneliti selama berlangsungnya penelitian lapangan. Penelitian kualitatif menafsirkan apa yang disebut dengan pernyataan, mencatat pola, proporsi, penjelasan, serta sebab maupun akibat yang dapat disimpulkan sebagai aturan metodologi penelitian yang telah mapan.



Gambar 1. Komponen Analisis Model Interaktif oleh Miles dan Huberman
Sumber: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Saldaña Johnny, Qualitative
Data Analysis: A Methods Sourcebook³⁹

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas terhadap hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Kompasiana, triangulasi data merupakan teknik pengumpulan berbagai data dan sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas pada suatu data dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara maupun dokument-dokumen lainnya. Selanjutnya, dilakukan juga triangulasi teknik yaitu dengan melakukan pengecekan pada data yang diperoleh menggunakan teknik

³⁹ Ibid

⁴⁰ –Kredibilitas dalam Penelitian Kualitatif - Kompasiana.com," diakses 11 Juli 2023, https://www.kompasiana.com/osydea/5587b266319373f5058b456a/kredibilitas-dalam-penelitian-kualitatif.

yang berbeda, seperti data yang diperoleh dari dokumentasi kemudian dicek kembali dengan wawancara.

G. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi data yang diperoleh melalui buku, artikel, catatan akhir tahun ECPAT Indonesia, jurnal penelitian, skripsi terdahulu, kanal berita *online*, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara secara *online* bersama Bapak Andy Ardian selaku Program Manager ECPAT Indonesia melalui media Zoom Meeting yang diselenggarakan pada Kamis 25 Mei 2023.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Ada pula tahap-tahap dalam penelitian yang dikenakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

- a. Tahap Persiapan. Langkah pertama yang dilakukan dalam tahap persiapan pada penelitian ini yakni pembuatan fokus penelitian yaitu bagaimana peran ECPAT Indonesia dalam membantu pemerintah mengatasi kejahatan pariwisata seks anak. Kemudian penulis menyusun kerangka konseptual diantaranya defnisi konsep peran, konsep kerja sama Internasioanl, International Non-Governmental Organization (INGO), ECPAT, dan pariwiata seks anak yang digunakan sebagai pedoman agar penelitian menjadi sistematis.
- b. Tahap pelaksanaan. Dilakukannya pengambilan data dengan metode dokumentasi yakni dengan mengumpulkan dokumen, buku, jurnal, artikel, berita *offline* dan *online*, hingga wawancara dengan berbagai pihak terkait.

c. Tahap analisis data, penelitian dalam menganalisa data mengenakan teknik analisis data interaksionis oleh Miles dan Huberman dengan melewati beberapa tahapan analisa data yakni : pengumpulan data (data collection), kondensasi data (condensation), penyajian data (data display), serta kesimpulan (conclusion).



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum ECPAT

1. ECPAT Internasional

ECPAT Internasional merupakan lingkup organisasi global dari tiap-tiap negara yang memerangi pelacuran terhadap anak, pornografi tentang anak, serta perdagangan terhadap anak guna maksud pemuas hasrat seksual. Pada tahun 1990 lingkup ECPAT muncul bersamaan dengan adanya kampanye yang menolak adanya pariwisata seks terhadap anak di Asia meliputi di Thailand, Sri Langka dan Filipina. Dengan adanya temuan seperti itu ECPAT membuat sebuah gerakan kampanye yang diberi judul —End Child Prostitution In Asia Tourism". Pada tahun 1996 ECPAT mengalami perkembangan ke negara lain seperti di Asia, Eropa serta Amerika. Dan nama ECPAT dilengkapi menjadi End Child Prostutution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes. Disebut dengan kampanye, maka ECPAT sukses dalam mengembangkan diri serta memobiliasai perhatian masyarakat, sedangkan bagi pemerintah di seluruh penjuru dunia mulai memberikan perhatian pada permasalahan yang ada tersebut.⁴¹

Dengan adanya kampanye tersebut membuat ECPAT melaksanakan Kongres Dunia Pertama yang dilakukan pada tahun 1996 di Swedia serta diwakili oleh 122 pemerintah yang bekerja sama dengan organisasi United Nations Children's Fund (UNICEF) maupun kelompok LSM dengan maksud

⁴¹ —Our Secretariat - ECPAT," diakses 22 Juni 2023, https://ecpat.org/about-us/.

kovensi Hak Anak. Hasil dari kongres tersebut, diputuskan bahwa ECPAT yang berawal dari adanya kampanye yang kian menjadi seklompk organisasi dalam basis non pemerintah resmi yang sekretariatnya bertempatan di Bangkok, Thailand.

Pada tahun 2001, Kongres Dunia Kedua dilakukan di Yokohama, Jepang. Dengan jumlah dari pemerintah yang mewakili lebih banyak dari jumlah sebelumnya yakni 134, dan pesertanya banyak dihadiri oleh anak muda. Kongres Dunia Kedua sukses dalam memobilisasi terhadap mitra-mitra yang berasal dari berbagai bidang serta mengumpulkan berbagai kemitraan stakeholder seperti pemerintah, penegak hukum, LSM, industri, pariwisata, instansi pembangunan Internasional serta perwakilan dari masyarakat sipil. Selanjutnya pada tahun 2008 Kongres Dunia Ketiga diadakan di Rio de Janeiro, Brasil. Dihadiri sekitar 137 pemerintah yang diwakili oleh badanbadan PBB, sektor swasta, anak-anak, orang muda, dan lain sebagainya. 42

Saat ini ada sekitar 62 grup di 50 negara yang masuk dalam jaringan ECPAT. Di tahun 1996 jaringan ECPAT hanya sekitar 17 grup. Tahun 1999 berkembang menjadi 53 grup. Memasuki tahun 2000-an jaringan ECPAT tersebar hampir keseluruh penjuru dunia yakni Eropa Barat ada 15 grup, Eropa Timur 6 grup, Afrika ada 9 grup, Asia ada 15 grup, Pasifik 3 grup, Amerika Utara 4 grup, Amerika Latin 10 grup. Dan Timur Tengah juga akan ikut bergabung ke dalam jaringan ECPAT. Grup yang terlibat dalam ECPAT sangat beragam, sebagain besar berkoalisi dengan organisasi non-pemerintah,

⁴² Ibid

sebagian yang lain terdiri dari individu-individu. Sebagian besar memiliki keuangan yang memadai dan sumber daya manusia yang cukup, sebagian kecil lainnya hanya terdiri dari relawan pekerja paruh waktu.⁴³

ECPAT juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi non pemerintah dan antar pemerintah internasional seperti The International Criminal Police Organization (Interpol), Inter-Americano Instituto del Nino, World Tourism Organization (WTO), The Asia-Europe Meeting (ASEM) dan berbagai lembaga lainnya seperti PP, UNICEF dan ILO-IPEC untuk bertukar irformasi, bertukar keterampilan dan tujuan advokasi.

2. ECPAT Indonesia

Sejak berdirinya ECPAT pada tahun 1990, ECPAT telah menghasilkan banyak negara yang ikut bergabung di dalamnya. Di Asia sendiri misalnya, terdapat 15 grup negara yang terlibat ke dalam ECPAT Internasional salah satunya adalah ECPAT Indonesia. ECPAT Indonesia merupakan organisasi NGO yang fokus pada isu Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA).⁴⁴

Jaringan ECPAT Indonesia hadir karena dilatarbelakangi oleh keinginan para aktivis-aktivis Indonesia yang melihat kondisi prostitusi anak di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya. Kondisi seperti ini diakibatkan karena tidak ada organisasi yang konsen pada permasalah prostitusi anak. Kemudian para aktivis melakukan konsultasi dan mengetahui bahwa ada NGO yang bernama ECPAT Internasional, di mana NGO ini konsen terhadap permasalah

-

⁴³ Ibid

^{44 -} Tentang Kami - ECPAT Indonesia."

eksploitasi seksual komersil anak seperti perdagangan anak guna maksud seks, pornografi anak, pelacuran anak, pariwisata seks terhadap anak, perkawinan terhadap anak, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2003 terdapat 17 LSM yang bergerak dalam lingkup perlindungan terhadap anak telah melakukan konsultasi nasional guna membentuk kelompok ECPAT di Indonesia. Kemudian tahun 2004, ECPAT Indonesia mendaftarkan diri ke ECPAT Internasional untuk bergabung bersama dengan negara-negara lain. Pada tahun 2005, barulah ECPAT Internasional memberikan putusan bahwa ECPAT Indonesia adalah bagian dari afilisasi ECPAT Internasional. Dan pada tahun 2012 ECPAT Indonesia mendapat pengakuan dari ECPAT Internasional.

Secara resmi ECPAT Indonesia berkantor di Jakarta dan bekerja sama dengan anggota jaringan lainnya. Yang berkomitmen lebih dari 11 provinsi di seluruh Indonesia. Di antaranya ada di Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Batam, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur.

_

⁴⁵—Ahad Sofian, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia: Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Meningkat | Republika Online," diakses 22 Juni 2023, https://republika.co.id/berita/koran/wawasan/nnibk929/ahmadsofiankoordinator-nasional-ecpat-indonesia-eksploitasi-seksual-anak-di-indonesia-meningkat.

Tabel 1. Anggota ECPAT Indonesia 46

No	Lembaga	Daerah
1	Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)	Medan
2	Center for Community Development & Education (CCDE)	Banda Aceh
3	Yayasan Perkumpulan Bandung Wangi (YPB)	Jakarta
4	Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)	Jakarta
5	Yayasan Kusuma Buana (YKB)	Jakarta
6	Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN)	Yogyakarta
7	Yayasan Indriya Nati (YIN)	Yogyakarta
8	Yayasan KAKAK	Surakarta
9	Yayasan SETARA	Semarang
10	Yayasan Dinamika Indonesia (YDI)	Bekasi
11	Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA)	Bandung
12	Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI)	Indramayu
13	Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI)	Mataram
14	Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara (YSSN)	Pontianak
15	Yayasan Asa Puan	Pontianak
16	Lembaga Advokasi Anak (LADA)	Lampung

 $^{^{46}}$ –CATATAN AKHIR TAHUN 2020 ECPAT INDONESIA - ECPAT Indonesia," diakses 16 Juli 2023, https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-akhir-tahun-2020-ecpat-indonesia/.

17	Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan	Riau
	(KASEH PUAN)	
18	Yayasan Lentera Anak Bali (LAB)	Bali
19	Yayasan Mimpi Nusantara Bersinar	Bali
20	Arek Lintang (ALIT)	Surabaya

Tabel 2. Kerja sama ECPAT Indonesia dengan Organisasi dan Lembaga Pemerintah di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional⁴⁷

No	Nama Institusi	
1	ECPAT International	
2	ECPAT Nederland	
3	Plan Indonesia	
4	Terredes Hommes (TDH)	
5	UNICEF	
6	Kinder Not Hilfe (KNH)	
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
8	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9	Kementerian Sosial	
10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
11	Kementerian Pariwisata	
12	Kementerian Desa	
13	Kementerian Informasi dan Komunikasi	

 $^{^{47}}$ -CATATAN AKHIR TAHUN 2020 ECPAT INDONESIA - ECPAT Indonesia."

14	Dinas Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan
15	Mahkamah Agung
16	PPATK
17	Google
18	Facebook
19	TikTok
20	US Department of Justice
21	Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)
22	Marrymond
23	MaPPI FH UI (IJRS)
24	Internet Wacth Foundation (IWF)

a. Visi dan Misi ECPAT Indonesia

Setiap organisasi memiliki tujuan kenapa organisasi itu dibentuk. salah satunya adalah adanya visi dan misi. Di mana visi dan misi merupakan harapan perjalanan sebuah organisasi kedepannya. ECPAT Indonesia sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi ECPAT Indonesia adalah —guna memberikan kebebasan dan perlindungan bagi setiap anak di negara Indonesia dari segala bentuk eksploitasi seksual serta guna memberikan agar hak-hak dasar anak-anak dijamin oleh pemerintah dan masyarakat."

Misi:

Kepada Anggota: —Berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam jaringan, memberikan kapasitas yang memadai kepada anggota, dan memperluas jaringan dalam setiap upaya untuk memerangi eksploitasi seksual anak-anak."

Kepada masyarakat: —meningkatkan kesadaran, kepedulian umum dan perspektif kritis tentang eksploitasi seksual anak, dengan berinvestasi dalam partisipasi oleh masyarakat luas dan generasi muda sebagai fokus."

Kepada pemerintah: —mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan administratif dan hukum dalam memerangi tindakan eksploitasi komersial anak-anak di Indonesia."

b. Logo ECPAT Indonesia



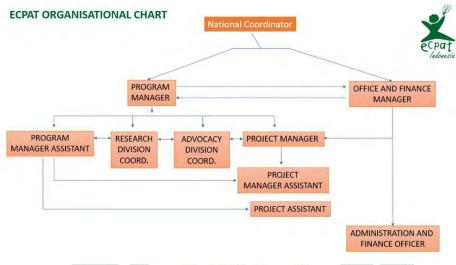
Gambar 2. Logo ECPAT Indonesia

Sumber: Website ECPAT Indonesia⁴⁸

_

⁴⁸ —Tentang Kami - ECPAT Indonesia."

c. Struktur Organisasi ECPAT Indonesia



Gambar 3. Struktur Organisasi ECPAT Indonesia

Sumber: Website ECPAT Indonesia⁴⁹

d. Pencapaian ECPAT Indonesia

- Bergabung dengan kampanye global ECPAT Internasional serta The Body Shop terkait -Hentikan Perdagangan Anak dan Orang Muda".
- Mengembangkan serta meluncurkan laporan Indonesia A4A dalam
 Agenda Untuk Aksi".
- Menyelesaikan laporan periodik pertama ECPAT Indonesia guna melangsungkan sidang UPR ke 13 tahun 2011.
- Mempromosikan kerja regional guna memerangi ESKA di seluruh negara ASEAN.
- Mengembangkan berbagai macam pelatihan —Organisasi yang aman untuk anak" di Indonesia.

digilib.uinsa.ac.id digili

⁴⁹ —Tentang Kami - ECPAT Indonesia."

- Melaksanakan beberapa konferensi di Indonesia.
- Dipilih sebagai Dewan Perwakilan ECPAT Indonesia di wilayah Regional Asia Timur.
- Mengembangkan beberapa publikasi ECPAT Internasional versi Bahasa Indonesia.

e. Jaringan dan Dukungan Internasional

- Aliansi Internasional (ECPAT Internasional)
- Bekerja sama dengan lembaga pemerintahan seperti Kementrian
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Departemen
 Pariwisata, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan
 Departemen Luar Negeri.
- Bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF,
 Kindernothilfe Germany, Mensen met een Missie Netherlands, Terre des Hommes, dan European Union.
- Akademisi dan Profesional (Profesor, Dosen, Konsultan, Praktisi Hukum, Peneliti, Pakar Program, dsb).
- Di sektor swasta ada The Body Shop, ACCOR group dan Archipelago International.

B. Permasalahan Pariwisata Seks Anak di Indonesia

Sektor pariwisata ialah usaha yang berkontribusi guna meningkatkan angka pendapatan pada suatu negara. Penduduk lokal dapat memperoleh manfaat, dikarenakan dapat mengelola bidang ekonomi semisal menjual ataupun memproduksikan berbagai kerajinan, menyediakan tempat tinggal seperti

homestay, menyediakan berbagai lapangan kerja, meningkatkan angka bisnis rumah makan serta lain sebagainya. Jumlah wisatawan mancanegara yang telah berdatangan ke negara Indonesia pada tahun 2015 sejumlah 10,41 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan hingga 3,2% dari pada tahun sebelumnya. Potensi dari destinasi wisata di Indonesia kian menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan asing, dengan begitu kedatangan turis dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. 50

Selain membawa implikasi yang positif, pariwisata juga membawa pengaruh negatif. Seperti salah satunya yakni munculnya praktik-praktik akan eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh para wisatawan, baik dari wisatawan dalam negeri ataupun luar negeri. Bentuk konkrit dari praktik eksploitasi seksual anak ini yakni pembelian akan seks terhadap anak, akses prostitusi online serta praktik terhadap pedofilia kerap bermunculan. Praktik eksploitasi seksual ini terjadi juga di berbagai fasilitas yang ada di lokasi wisata meliputi hotel, tempat kaorke, club, hingga panti pijat. Dengan begitu, keterlibatan dalam berbisnis melindungi anak-anak menjadi hal yang penting supaya wisata Indonesia tetap menghormati perlindungan hak asasi terhadap anak. Praktik-praktik eksploitasi seksual terhadap anak di daerah wisata biasa disebut pariwisata seks terhadap seorang anak.⁵¹

Pariwisata seks terhadap anak yakni situasi dimana anak-anak di eksploitasi untuk tujuan seksual yang kerap dilakukan para wisatawan atau

⁵⁰ PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BISNIS WISATA," diakses 22 Juni 2023, https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/5711perlindungan_hukum_anak-di-bisnis-wisata/.

51 Ibid

pelancong atau orang yang sebenarnya datang ke suatu tempat baik itu untuk kunjungan bisnis misalnya dia tidak menetap dalam kurun waktu yang lama atau dia adalah warga negara asing bukan orang lokal yang melakukan aktivitas masih berkaitan dengan daerah-daerah pariwisata dan dia masih dalam konteks transmigrasi ke tempat lain. Namun *terms* pariwisata seks anak untuk saat ini sudah tidak gunakan lagi karena banyaknya pertentangan dari pihak pariwisata, jadi *terms* yang digunakan baik di internasional maupun ECPAT Indonesia adalah eksploitasi seksual anak di sektor pariwisata dan perjalanan. PSA biasanya meliputi dengan memberi uang, makanan, pakaian, ataupun bentuk kebaikan lainnya yang ditujukan kepada anak tersebut maupun pihak ketiga guna melakukan hubungan badan. PSA berlangsung di setiap lokasi bermula dari lokalisasi daerah pelacuran hingga pantai ataupun hotel berbintang serta wilayah perkotaan, pedesaan dan pesisir.

Pelaku kejahatan seksual anak tidak mudah di spesifikkan menjadi satu jenis saja dikarenakan orang dalam berbagai kalangan pun bisa menjadi pelaku kejahatan seksual anak. Adapun pelaku adalah orang yang berstatus menikah ataupun yang berstatus lajang, laki-laki ataupun perempuan (meskipun sebagian besar pelaku yakni laki-laki), wisatawan asing maupun penduduk lokal, wisatawan tajir ataupun wisatawan golongan ekonomi menengah serta yang berlatar belakang sosial-ekonomi yang tinggi hingga yang berlatar belakang sosial-ekonomi rendah. Meskipun sebenarnya pelaku kejahatan seksual anak tersebut tidak mempunyai bentuk fisik tertentu, pola dalam bertingkah laku secara sosial ataupun perangai yang memiliki perbedaan, meski begitu mereka tergolong

ke dalam tiga kategori yang tidak sama. Yang pertama adalah wisatawan seks anak situasional dimana biasanya oknum ini melakukan tindak pidana kekerasan pada anak dengan mencoba-coba, sebenarnya pelaku ini tidak mempunyai kecenderungan seksual yang khusus pada anak-anak namun memang mereka biasanya akan memanfaatkan momen yang ada dalam melakukan tindakannya. Kemudian yang kedua adalah wisatawan seks anak preferensial dimana biasanya oknum akan menunjukkan sebuah pilihan terhadap seks aktif yang ditujukan bagi anak-anak, meskipun pelaku masih mempunyai ketertarikan seksual pada orang dewasa. Namun pada hakikatnya wisatawan seks anak prefensial ini akan menelusuri anak-anak dalam masa pubertas ataupun remaja. Dan yang ketiga adalah pedofil dimana biasanya pelaku ini menunjukkan kecenderungan seksual terkhusus pada anak-anak yang belum pubertas. Meskipun seringkali ada anggapan bahwa pedofil ini merupakan sebuah ganggaun atau penyakit klinis, tetap saja tidak dapat dipungkiri pedofil dapat tidak menunjukkan akan pilihan pada jenis kelamin setiap anak tersebut serta berasumsi bahwasannya melakukan hubungan badan terhadap anak-anak disebut tidaklah berbahaya.

Para korban PSA seringkali berlatarbelakang sosial-ekonomi yang dapat dikatakan tidak baik. Dengan demikian, hal ini tidaklah menjadi satu-satunya dari ciri-ciri para korban, banyak dari pada mereka yang berdatangan dari berbagai suku golongan minoritas, masyarakat yang mengungsi serta golongan sosial lainnya yang termajinalkan. Biasanya sasaran tersebut ialah anak laki-laki maupun perempuan dimana sebagian dari pada mereka yakni telah mengalami kekerasan didalam rumah mereka maupun penelantaran. Lalu juga terdapat anak-anak yang

sudah dipaksa bekerja oleh keadaan, terkhususnya bagi anak-anak yang berkecimpung dalam hal ini serta anak-anak yang bergantung dengan penghasilan sesaat, dengan begitu mudah bagi anak menjadi korban dalam pariwisata terhadap seks anak. Terkadang, dikarenakan mereka lahir dari daerah tujuan wisata yang di cirikan dengan kesenjangan sosial antara wisata yang berkunjung dengan para warga sekitar dengan menjadikannya lebih dari cukup bahwasannya anak itu guna dieksploitasikan dalam pariwisata seks terhadap anak.

Bentuk pariwisata seks terhadap anak yang paling mudah terlihat di Indonesia adalah prostitusi anak dimana para tamu baik warga negara asing maupun lokal yang berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia, mereka biasanya melakukan aktivitas seksual dengan anak. Bentuk lain yang dapat kita jumpai adalah hadirnya sebuah agensi yang melakukan semacam kunjungan wisata ke satu tempat, namun yang terjadi adalah agensi tersebut memfasilitasi terjadinya kejahatan seksual anak. Lalu ada bentuk lain dari pariwisata seks anak yaitu pembuatan program seperti kunjungan ke panti asuhan, kunjungan untuk daerah miskin atau bisa disebut dengan istilah pariwisata slum area.

Pariwisata seks anak sering kali terjadi karena adanya oknum yang mewadahi pelaku dalam mengakses anak. Banyak bentuk yang dilakukan oleh oknum dalam melakukan aksinya seperti adanya transfer uang dari pelaku kepada individual yang nantinya oleh orang tersebut akan disediakan anak-anak sesuai permintaan. Terdapat juga oknum yang bermodelkan sindikat dimana mereka memang memobilisasi anak-anak bukan hanya untuk wisatawan asing tetapi juga wisatawan lokal. Biasanya sindikat ini akan melakukan semacam expo ke

beberapa kota dengan membawa anak-anak dan ditawarkan kepada tamu-tamu yang sedang berada di kota itu.

Di Indonesia sendiri pernah terjadi beberapa kasus PSA seperti pada tahun 2013, terdapat warga negara Belanda bernama Jan Jacobus Vogel yang melakukan pelecehan seksual terhadap 4 anak di Kab. Buleleng, Bali. Ia melakukan aksinya dengan cara berpura-pura memberi bantuan berupa uang dan sejumlah barang. Atas aksinya tersebut, pelaku dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Selanjutnya juga terdapat kasus pada tahun 2016, Robert Andrew Fiddes Ellis seorang warga negara Australia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah atas tindakan pencabulan yang dilakukan berulang kali terhadap anak-anak di wilayah Denpasar, Bali. Kemudian pada tahun 2020, pria warga negara Perancis bernama Francois Camille Abello berusia 65 tahun ditemukan bunuh diri dalam sel tahanan di daerah Jakarta. Sebelumnya pelaku telah dijatuhi vonis hukuman mati atas kejahatan seksual yang telah ia lakukan. Menurut kepolisian, pelaku menargetkan anak-anak jalanan yang kemudian dibujuk dengan sejumlah uang untuk melakukan sesi foto di dalam kamar hotelnya dan pada akhirnya pelaku melakuan pelecehan seksual kepada korban. Dari hasil temuan keopilisian, pelaku

_

⁵² — Terbukti Cabuli 4 Bocah, Bule Belanda Dihukum 3 Tahun Penjara," diakses 22 Juni 2023, https://news.detik.com/berita/d-2228537/terbukti-cabuli-4-bocah-bule-belanda-dihukum-3-tahun-penjara.

⁵³ —Divonis 15 Tahun Penjara, Kakek Cabul Asal Australia Ajukan Banding - Tribunbali.com," diakses 22 Juni 2023, https://bali.tribunnews.com/2016/10/25/divonis-15-tahunpenjara-kakek-cabul-asal-australia-ajukan-banding.

telah melecehkan lebih dari 300 anak usia 10-17 tahun.⁵⁴ Dan masih banyak lagi kasus-kasus PSA lainnya yang terjadi di Indonesia.

C. Peran ECPAT Indonesia: Perlindungan



Gambar 4. Lokakarya Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus dengan Mitra UPTD PPA Kabupaten Sleman

Sumber: Instagram ECPAT Indonesia⁵⁵

Perlindungan merupakan salah satu bentuk dari peran INGO yaitu implementers (pelaksana). Dalam bidang perlindungan ini ECPAT Indonesia melakukan upaya untuk pemenuhan hak-hak korban. ECPAT Indonesia membuka saluran pelaporan bagi korban atau keluarga korban yang membutuhkan bantuan, dimana ECPAT Indonesia merespon aktivitas ini dengan memberikan dukungan

⁵⁴ —French man accused of molesting hundreds of children dies in Indonesia - BBC News," diakses 22 Juni 2023, https://www.bbc.com/news/world-asia-53391233.

⁵⁵—ECPAT INDONESIA di Instagram: Perempuan dan Anak adalah bagian dari warga masyarakat yang biasanya rentan terhadap kekerasan dan pelecehan. ECPAT Indonesia melaksanakan lokakarya sehari bersama stakeholder mitra UPTD PPA salah satunya UPTD PPA Kab. Sleman. Lokakarya sehari bersama stakeholders mitra UPTD PPA dimaksudkan untuk membangun kesamaan perspektif tentang perlindungan anak dan implementasinya dalam mekanisme penanganan kasus yang dilakukan. Peserta Lokakarya yang hadir dalam lokakarya ini adalah mereka yang telah terlibat dalam penanganan kasus atau layanan terhadap korban di wilayah setempat.,'" diakses 22 Juni 2023, https://www.instagram.com/p/Cd-OVrvrBef/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg==.

langsung namun lebih banyak untuk merefer ke layanan yang sekiranya dibutuhkan oleh korban dan selalu memantau proses pelaksanaan hukum dari kasus yang terjadi. Selain itu, ECPAT Indonesia juga mengadakan berbagai pelatihan, pendidikan, pendampingan serta *sharing* terkait dengan informasi bersama instansi mitra. Salah satu pelatihan yang diselenggarakan oleh ECPAT Indonesia berupa pelatihan psikososial hingga rehabilitasi pada anak sebagai korban penguatan internal maupun eksternal.

Perempuan dan anak adalah bagian dari arga masyarakat yang biasanya rentan terhadap kekerasan dan pelecehan terutama di sektor pariwisata. Seperti yang terlihat pada Gambar 4. ECPAT Indonesia melaksanakan lokakarya sehari bersama stakeholder salah satu mitra UPTD PPA yang bertempat di Kabupaten Sleman. Lokakarya sehari bersama stakeholder mitra UPTD PPA dimaksudkan untuk membangun kesamaan perspektif tentang perlindungan anak dan implementasinya dalam mekanisme penanganan kasus yang dilakukan. Peserta lokakarya yang hadir merupakan orang-orang atau mereka yang terlah terlibat dalam penanganan kasus atau layanan terhadap korban di wilayah setempat. Lokakarya seperti ini tidak hanya dilakukan oleh ECPAT Indonesia di Kabupaten Sleman namun masih banyak daerah lain seperti Sidoarjo, DKI Jakarta, Kota Bandung, Surakarta dan daerah lainnya.

D. Peran ECPAT Indonesia: Pencegahan

Pencegahan juga merupakan salah satu bentuk dari *implementers*. Dalam bidang pencegahan ini ECPAT Indonesia melakukan beberapa hal seperti melakukan upaya penyadaran di masyarakat melalui kampanye, media KIE

(komunikasi, informasi dan edukasi) serta kegiatan sosialisasi untuk masyarakat umum. Upaya tersebut dilakukan bersama kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kementrian PPPA) dimana menjadi upayanya adalah membangun aktivitas kader masyarakat perlindungan anak terpadu dengan basis masyarakat (PATBM) pada tingkat kelurahan melalui beberapa kegiatan pelatihan diantaranya desa bebas pornografi, desa wisata ramah terhadap anak bebas dari tindak kejahatan maupun eksploitasi serta desa internet aman untuk anak.



Gambar 5. Langkah Awal dalam Melindungi Anak dari Situasi Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

Sumber: Website ECPAT Indonesia⁵⁶

Secara keseluruhan, usaha dari bidang pariwisata yakni bisnis yang sangat memberi keuntungan bagi perekonomian negera Indonesia. setiap turis yang

⁵⁶ — Ingkah Awal Dalam Melindungi Anak Dari Situasi Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata Bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) - ECPAT Indonesia," diakses 22 Juni 2023, https://ecpatindonesia.org/berita/langkah-awal-dalam-melindungi-anak-dari-situasi-eksploitasi-seksual-di-destinasi-wisata-bersama-gabungan-industri-pariwisata-indonesia-gipi/.

berdatangan ke negara Indonesia dapat memberikan rata-rata 1.100 dollar AS hingga 1.200 dollar AS pada setiap perjalanannya. Hingga pada saat ini, bidnag industri pariwisata menyumbang sekitar 4% dari keseluruhan perekonomian negara Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia hendak meningkatkan angka terkait menjadi dua kali lipat. Dengan demikian, banyaknya cara yang dilakukan oleh pemerintah supaya jumlah dari wisatawan akan terus bertambah. Seperti pembebasan visa bagi wisatawan mancanegara di beberapa negara yang berkeinginan mengunjungi negara Indonesia. Di lingkungan wisata yang berpotensi sebagai eksploitasi seksual terhadap anak sangatlah besar mengingat akan mudahnya wisatawan guna berkunjung. Salah satunya yakni wisatawan asing yang melakukan perjalanan ke Indonesia.⁵⁷

Banyak dari mereka yang tidak hanya mempunyai tujuan datang guna melakukan liburan serta berbisnis, melainkan mempunyai motif lain yakni ekslpoitasi anak dengan memuaskan hasrat seksual mereka. Pata pelaku eksploitasi sesksual terhadap anak yang tidak hanya dilakukan oleh wisatawan asing saja, melainkan dilakukan juga oleh wisatawan lokal. Dengan begitu makin maraknya wisatawan yang berdatangan akan semakin besarnya potensi guna terjadinya tindak eksploitasi seksual terhadap anak yakni di lingkungan wisata. Pada tahun 2018, terdapat 80 kasus prostitusi terhadap anak, 75 kasus eksploitasi pekerja terhadap anak, 57 kasus eksploitasi seksual komersial terhadap anak, serta 52 kasus trafficking terhadap anak. Dari data terkait, beberapa diantaranya yang terjadi yakni di lingkungan wisata. Pada akhir tahun 2018, Komisi Perlindungan

⁵⁷ Ibid

Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwasannya Bali yang menjadi tempat lokasi utama dari prostitusi terhadap anak. Kemudian pada awal tahun 2019 terkuak adanya lima orang anak dibawah umur yang di eksploitasi secara seksual di Sanur, Bali. Umur dari anak-anak tersebut yakni 14-17 tahun. Berbagai macam faktor yang melatar belakangi kasus eksploitasi seksual terhadap anak ini yakni faktor ekonomi.⁵⁸

Selain Bali, adapun sembilan wilayah yang telah ditemukan adanya kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Berdasarkan data penelitian yang dialakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta ECPAT Indonesia pada tahun lalu, kawasan yang kerap terkenal sebagai tujuan utama dari adanya kasus eksploitasi seksual terhadap anak yakni Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jakarta Barat dan Pulau Seribu (DKI Jakarta).

Meninjau kasus dari eksploitasi seksual terhadap anak di tempat wisata yang makin banyak terjadi, ECPAT Indonesia bersama dengan Terre des Hommes dan PLAN, bekerja sama guna menghilangkan kasus tersebut dengan melalui aliansi Down to Zero. Guna menghilangkan kasus tersebut, dibutuhkan upaya serta kejasama hingga bantuan dari banyak pihak. Hingga kini aliansi Down to Zero menjalani kerja sama dengan pemerintah serta *private sector*. Pada hari Senin, 25 Februari 2019, seperti yang terlihat di **Gambar 5.** ECPAT Indonesia sebagai perwakilan dari Down to Zero berkunjung ke Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). GIPI ialah organisasi yang disahkan berdasarkan

⁵⁸ Ibid

Undang-undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. GIPI mempunyai kurang lebih dari 50 anggota yang mana terdiri dari bermacam usaha wisata seperti hotel, travel, dan lain sebagainya. Lain pada itu, GIPI mempunyai kurang lebih dari 20 DPD yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Meninjau dengan adanya praktik eksploitasi seksual terhadap anak di lingkup wisata, bekerja sama dengan para usahawan ialah hal yang sesuai guna mencegah adanya peluang terhadap kasus eksploitasi seksual terhadap anak di lingkup lokasi wisata.

Adanya tiga program dari Down to Zero yang dibicarakan pada saat pertemuan tersebut. Pertama, adanya program lokakarya dimana guna membangun pedoman yang terdiri atas tiga materi. Salah satu dari materi itu yakni pedoman pra-teknis peraturan kementerian pariwisata pada tahun 2010 terkait dengan mencegah pariwisata seksual terhadap anak di wilayah wisata. Dalam suatu program lokakarya ini, GIPI sangat diharapkan dapat membantu dalam melakukan guidelines serta menjadi peserta dalam lokakarya. Kedua, yakni kampanye -Kids Aren't Souvenirs" yang memiliki tujuan guna berpartisipasi dalam pencegahan serta penghapusan tindak eksploitasi seksual terhadap anak. Ketiga, yakni - The Code" yang dimana sebagai insiatif yang disahkan oleh ECPAT Internasional yang ada dikarenakan adanya situasi dari eksploitasi seksual terhadap anak dalam lingkup wisata guna membangun tools serta mendukung segala usaha dari pariwisata yang memiliki komitmen guna memberi perlindungan pada anak dari adanya kasus eksploitasi seksual tersebut. GIPI meninjau kasus eksploitasi seksual di lingkup pariwisata serta memiliki komitmen guna pencegahan eksploitasi seksual pada wilayah wisata dengan berkontribusi

dengan ECPAT Indonesia dengan melalui penandatanganan MoU yang akan dilakukan pada tahun ini. Dari adanya dukungan tersebut maka diharapkan akan menjadi usaha awal guna terciptanya lingkup wisata yang aman bagi kesejahteraan anak-anak, terpenting situasi eksploitasi seksual terhadap anak. ⁵⁹



Gambar 6. Kampanye Wujudkan Bersama Asian Games 2018 Ramah Anak
Sumber: Website ECPAT Indonesia⁶⁰

ASIAN Games Ramah Anak yakni sebuah upaya preventif guna mewujudkan acara olahraga dalam skala internasional yang ramah terhadap anak dengan melaksanakan himbauan yang berbentuk kampanye kepada masyarakat umum sebagaimana diterapkan oleh ECPAT Indonesia dengan KOMPAK Jakarta sesuai dengan Gambar 6. Fakta terkuak bahwasannya eksploitasi seksual terhadap anak dalam acara olahraga secara nasional ataupun internasional

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ –Wujudkan Bersama Asian Games 2018 Ramah Anak - ECPAT Indonesia," diakses 22 Juni 2023, https://ecpatindonesia.org/berita/3666/.

memunculkan kekhawatiran tersendiri bagi seluruh pihak. Hal tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah turis asing yang berdatangan seperti atlet, maupun pendukung yang berdatangan dari berbagai latar belakang yang mempunyai ragam intensi, yang kemungkinan tidak hanya sekedar menikmati acara olahraga tersebut, akan tetapi juga bertujuan guna bersenang-senang dengan menjerumuskan anak kepada kegiatan prostitusi. Kejadian empat atlet Jepang yang membeli jasa prostitusi menjadi bukti yang nyata bahwasannya permohonan seks komersial dapat terlaksana jika acara olehgara berjalan.

Upaya yang diterapkan guna menciptakan kegiatan olahraga ramah terhadap anak, terkhusus ASIAN Games, ialah dengan melakukan kampanye secara langsung kepada masyarakat dengan sosialisasi secara offline serta dengan melalui sosial media. Kampanye yang dilakukan secara online sebagaimana pada umumnya di Twitter @ECPAT_Indonesia didukung secara keseluruhan oleh Twitter Indonesia dengan melalui Twitter Ads for Goods. Kampanye tersebut memiliki tujuan guna mengajak secara masif bagi masyarakat Indonesia serta wisatawan asing guna menciptakan ASIAN Games yang ramah terhadap anak. Bentuk dari adanya kampanye online itu sendiri yakni berbentuk thread, materi gambar, interaksi dengan polling, hingga video yang berisikan dukungan oleh pengunjung guna mewujudkan ASIAN Games yang ramah terhadap anak dengan disertai tagline –Kids Aren't Souvenirs''. Kampanye-kampanye tersebut menguak fakta akan kerentanan anak yang berada dalam prostitusi sekaligus upaya preventif yang dapat diterapkan jika meninjau ataupun menjadi saksi dalam prostitusi yang berbentuk insiatif guna melakukan laporan.

Selain dengan menghimbau masyarakat melalui sosial media, ECPAT Indonesia dengan teman KOMPAK Jakarta ikut turun langsung ke kisaran Gelora Bung Karno (GBK) guna mensosialisasikan penyelenggaraan ASIAN Games 2018 yang ramah terhadap anak secara langsung kepada para pengunjung Gelora Bung Karno. Lain pada itu, kami juga memperoleh dukungan dari para pengunjung lokal dan pengunjung asing. Beberapa dari pengunjung telah mengetahui akan potensi dari eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi selama acara tersebut berlangsung. Akan tetapi, masih banyaknya pengunjung yang belum mengetahui serta tidak berfikir akan kemungkinan dari potensi tersebut. Adapun mayoritas dari pengunjung tersebut yang tidak mengetahui bahwasannya dengan adanya layanan laporan tersebut dapat menampung serta menindaklanjuti kasus tersebut dapat terjadi kembali.⁶¹

Tidak dapat dipungkiri dalam melakukan upaya pencegahan, ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan juga *private sector*. Untuk ranah *private sector* sendiri, ECPAT Indonesia bekerja sama dengan industri pariwisata seperti accor group hotel dan archipelago international dimana kedua pihak tersebut adalah sebuah grup hotel yang sudah memiliki ratusan lebih hotel yang tersebar di seluruh Indonesia. Upaya yang dilakukan adalah menghimbau internal perusahaannya untuk melakukan upaya pencegahan serta penanganan situasi eksploitasi seksual anak yang terdapat di hotel dengan penerapan *the code*. Industri pariwisata yang tergabung pada *the code* tersebut memberikan persetujuan enam kriteria yaitu

⁶¹ Ibid

menyusun kebijakan anti-PSA, melatih staf guna dapat melaporkan hingga mencegah kejahatan PSA, memastikan tiap instansi yang terlibat setuju guna memerangi kejahatan PSA, meningkatkan angka kesadaran wisatawan yang berkunjung, memberikan informasi kepada orang-orang penting atau orang terpandang yang mempunyai pengaruh pada warga lokal, hingga melaporkan kejadian di setiap tahunnya akan bagaimana proses penerapan dari *the code* itu sendiri.



Gambar 7. Penandatanganan Bergabungnya Archipelago International sebagai Bagian dari *The Code*

Sumber: timesindonesia.co.id⁶²

Dalam Usaha guna melindungi keselamatan anak dari tindak eksploitasi seksual, maka ECPAT Indonesia dan Archipelago International, yang merupakan grup manajemen hotel swasta serta independen terbesar di Asia Tenggara yang tergolong pada organisasi *The Code*. Hal ini dapat dilihat

_

⁶² —Indungi Anak-Anak, Archipelago Gabung dengan The Code," diakses 22 Juni 2023, https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/341357/lindungi-anakanak-archipelago-gabung-dengan-the-code.

berdasarkan **Gambar 7.** Yang mana ditandai dengan penandatanganan pada 8 April 2021 lalu yang dilaksanakan di The Grove Suites by Grand Aston Jakarta.

E. Peran ECPAT Indonesia: Advokasi

Advokasi adalah bentuk dari peran INGO yaitu *catalyst* (katalis). Advokasi berarti sebuah langkah guna merekomendasikan kepada orang lain ataupun menyampaikan isu terpenting guna dijadikan sebagai pusat perhatian oleh warga maupun mengarahkan perhatia pada para pembuat kebijakan guna menelusuri penyelesaian dari permasalahan yang ada hingga membangun relasi akan konflik yang ada serta memberi usulan terkait cara menyelesaikan masalah tersebut. 63

Tanggung jawab terbesar untuk melindungi anak dari PSA yakni di tangan pemerintah nasional. Sebagaimana langkah awal yang mendesak, pemerintah wajib mengumpulkan informasi terkait dengan PSA guna memahami kelanjutan dari kejahatan tersebut. Pemerintah juga diharuskan menciptakan peraturan yang memiliki tingkat kekuatan guna memberikan sanksi pada seluruh oknum, termasuk dalam pelancong domestik hingga perantara, serta mereka wajib memastikan bahwasannya pihak kepolisian mempunyai segala yang dibutuhkan guna menegakkan peraturan tersebut. Pemerintah harus dapat memberi kepastian bahwasannya anak-anak hingga masyarakat memiliki cara melaporkan PSA tanpa adanya rasa takut. Apabila pemerintah menciptakan rencana guna mengembangkan pariwisata, mereka diwajibkan menilai pengaruh apa yang

-

⁶³ Wahyudha, —PERAN ECPAT (END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES) DALAM MENGATASI CHILD SEX TOURISM DI INDONESIA."

muncul akibat perkembangan industri pariwisata ini pada anak-anak dan warga sekitar. Mereka juga diharuskan membuat norma hingga panduan perlindungan anak yang kuat bagi sektor pariwisata. Serta untuk memilih orang-orang yang kerja dekat dengan anak-anak, semisal sekolah, panti asuhan, dan selama situasi darurat kemanusiaan. Mereka diharuskan memberi kepastian bahwasannya program-program pencegahan untuk anak-anak yang memiliki resiko serta program-program rehabilitasi maupun reintegrasi bagi korban anak.

Dalam mengatasi kejahatan PSA, ECPAT Indonesia melakukan advokasi dalam beberapa hal seperti mendorong adanya regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak agar diterapkan, dimana ECPAT Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat laporan implementasi dari *Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* (OPSC) pasca di ratifikasi di Indonesia pada tahun 2012 yang semestinya dua tahun pasca ratifikasi, Indonesia diharuskan menyusun laporan kepada komite hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun pada tahun 2019, pemerintah akhirnya mendrafting laporan negara terkait implementasi OPSC, namun terhenti dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi dan sampai saat ini laporan tersebut belum di submit.



Gambar 8. Pertemuan Penysus<mark>unan Laporan OPSC dan OPAC di KemenPPPA Sumber: Website ECPAT Indonesia⁶⁴</mark>

Pada tanggal 12 Januari 2017, seperti yang terlihat pada Gambar 8. ECPAT Indonesia diundang oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mengulas terkait dengan Laporan Pemerintah mengenai OPAC serta OPSC. Pertemuan ini yakni sebagai sebuah pertemuan perdana yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak dalam mengulas laporan pemerintah terkait dengan OPAC serta OPSC. Pertemuan ini ikut dihadiri oleh perwakilan deputi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, hingga Pak Hamid yang dimana memiliki peran sebagai konsultan yang berhubungan dengan laporan-laporan terkait dengan konvensi hak terhadap anak pada Komite

⁶⁴ —Pertemuan Penyusunan Laporan OPSC dan OPAC di KPPPA - ECPAT Indonesia," diakses 22 Juni 2023, https://ecpatindonesia.org/berita/pertemuan-penyusunan-laporan-opsc-dan-opac-di-kpppa/.

Hak Anak PBB. Dengan melalui pertemuan ini, dijelaskan bahwasannya kementerian Hukum dan HAM sebetulnya memberi target akan benturan dengan melalui laporan CEDAW, sehingga pihak kemenkumham akan memprioritaskan guna menyelesaikan laporan terhadap CEDAW terlebih dahulu. Pihak dari Kementerian Hukum dan HAM memfokuskan di tahun ini dapat menuntaskan kedua laporan tersebut dengan menyediakan anggaran dalam menyusun laporan tersebut. Selaras dengan Kemenkumham, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki kesepakatan guna dapat mempercepat kinerja mereka serta waktu yang digunakan dalam menulis laporan OPSC serta OPAC. Pihak KPPPA memfokuskan pada bulan Maret tahun 2017, draft 1 pada laporan tersebut telah terselesaikan. Kelanjutan dari pertemuan tersebut yakni pihak kementerian hukum dan HAM akan melakukan tinjauan kembali pada matriks yang telah disusun sebelumnya, yang kemudian diikuti dengan membentuk tim kecil guna menulis laporan tersebut.

Selain itu ECPAT Indonesia juga melakukan advokasi terkait perlindungan anak di ranah daring, dimana ECPAT Indonesia mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi yang saat ini sedang dilakukan drafting peraturan presiden terkait perlindungan anak secara daring, dengan adanya peta jalan ini setidaknya bagi kementrian lembaga memiliki peran dan tanggung jawab dalam merespon situasi tersebut.

ECPAT Indonesia juga melakukan advokasi terkait penegakan hukum, dimana ECPAT Indonesia melakukan kerja sama dengan Lemdiklat Polri,

_

⁶⁵ Ibid

Badiklat Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung. Kerja sama yang dilakukan yaitu dengan membuat modul dan panduan penanganan korban eksploitasi seksual anak serta melakukan beberapa training mengenai penanganan korban eksploitasi seksual anak. Sebagai salah satu mitra yang ada dalam program *Down to Zero*, ECPAT Indonesia fokus akan gerakan instansi pengak hukum serta peradilan guna menerapkan berbagai kebijakan, protokol serta rencana aksi guna memerangi pariwisata seks anak secara efektif di negara Indonesia.

Dalam menerapkan advokasi, ECPAT Indonesia tidaklah mengajukan suatu tuntutan, tetapi mengajukan saran hingga masukan pada program yang dibuat pemerintah ataupun hukum yang ditetapkan pemerintah guna dapat meningkatkan kewaspadaan serta sadar terhadap ancaman kejahatan baru yakni pariwisata seks terhadap anak ini yang mana terfokuskan pada kementerian pariwisata hingga kementerian pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Dikarenakan ECPAT Indonesia jika dibandingkan dengan mengajukan suatu tuntutan pada pemerintah melalui memberi saran secara langsung, dapat lebih dipermudah guna ditanggapi dengan optimal serta guna melakukan kerja sama dalam bentuk program ataupun hukum yang baru. Hal tersebut terlaksana dengan optimal yakni melakukan kerja sama dengan kementerian pariwisata melalui menyusun pedoman pencegahan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak di lingkup pariwisata dengan berlandaskan peraturan menteri No. 30/MK

2001/MKP 2010 maupun ikut serta dalam program kementerian yakni program desa wisata ramah terhadap anak.⁶⁶

F. Peran ECPAT Indonesia: Kerja sama

Kerja sama merupakan bentuk dari peran INGO yaitu partners (mitra). Kerja sama yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia menyasar semua sektor baik kerja sama dengan pemerintah (kementerian atau dinas terkait), dengan penegak hukum, dengan lembaga internasional seperti —the International Criminal Investigative Training Assistance Program, of the United States Department of Justice (US DOJ ICITAP), Agence France-Presse (AFP), Federal Bureau of Investigation (FBI), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children (ACWC), ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)," Kedutaan Perancis serta Kedutaan Belanda dan juga sektor industri seperti di perhotelan dan industri platform digital.

ECPAT Indonesia mengawali kerja samanya dengan Kementrian Pariwisata (Kemenpar) pada tahun 2007 silam dengan cara menggaungkan konteks pariwisata seks anak. Setelah adanya penggaungan konteks tersebut akhirnya dari pihak Kemenpar sendiri membuat peraturan Menteri Kementrian Pariwisata Nomor 30 Tahun 2010 terkait dengan pencegahan eksploitasi seks anak di destinasi tujuan pariwisata, yang itu kemudian pada tahun 2016 mereka perbarui dalam regulasi peraturan Menteri Kemenpar tentang pariwisata

-

⁶⁶ Wahyudha, —PERAN ECPAT (END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES) DALAM MENGATASI CHILD SEX TOURISM DI INDONESIA."

berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, Kemenpar melakukan revisi kembali pada tahun 2021 tentang pariwisata berkelanjutan yang didalamnya sudah mencantumkan konteks upaya pariwisata untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan seksual pada anak. Selanjutnya pada tahun 2019, ECPAT Indonesia dan Kemenpar menerbitkan sebuah buku panduan tentang bagaimana komunitas bisa berkolaborasi dengan pelaku industri wisata sebagai tindakan pencegahan ekploitasi seksual anak. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi bersama dalam upaya mengedukasi kelompok-kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang biasa disebut dengan program sosialisasi sapta pesona. Kegiatan ini dilakukan di beberapa tempat diantaranya ada Banten, Bali dan juga di daerah Bangka Belitung.



Gambar 9. Eksplorasi Kerja sama ECPAT Indonesia dengan Kementrian Pariwisata Sumber: Website ECPAT Indonesia ⁶⁷

⁶⁷ – Eksplorasi Kerja sama dengan Kementerian Pariwsata - ECPAT Indonesia."

Dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini, pariwisata menjadi bidang yang berkembang signifikan. Target dari wisatawan yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya membuat kementerian pariwisata bersama dengan pemangku kebijakan akan penyusunan strategi serta inovasi yang tepat dalam pembangunan destinasi wisata di negara Indonesia. Usaha guna membuat bidang pariwisata yakni diproyeksikan dapat memberi sumbangan devisa yang besar pada tahun 2019, yakni sebesar USE 20 miliar. Lain pada itu, *country branding* Wonderful Indonesia menduduki peringkat 38 dunia serta dapat mengalahkan Truly Asia Malaysia maupun Amazing Thailand.

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia sangatlah pesat sebagaimana diiringi dengan citra pariwisata Indonesia yang makin membaik di pandangan dunia yang mana juga harus diseimbangi dengan rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai mana pihak yang berdampak. Terkhusus pada peran anak yang mana menjadi lebih waspada guna terjadinya tindak eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam kode etik global (Global Code of Ethics for Tourism (GCET)) yang dibuat United Nation World Tourism Organization (UNWTO) secara tegas dijelaskan bahwasannya —eksploitasi pada manusia dalam segala bentuk terkhusus secara seksual, terlebih lagi jika dihubungkan dengan anak, yakni bertentangan dengan tujuan utamanya dari pariwisata serta sebagai pelanggaran dari adanya praktik pariwisata." Adapun dalam penelitian Global Study yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia serta ECPAT International (2017) dijumpai praktik-praktik eksploitasi seksual terhadap anak di berbagai titik wisata, seperti Bali, Jakarta, Medan serta Batam.

Pada bulan april 2019 lalu, sebagaimana terdapat pada **Gambar 9.** ECPAT telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Pariwisata sebagaimana menyusun alat guna membantu yakni –KOLABORASI" guna komunitas dalam lingkup advokasi kepada usaha pariwisata. Kerja sama itu menjadi salah satu upaya guna menciptakan pariwisata yang berlkelanjutan dengan hilangnya kasus eksploitasi seksual terhadap anak pada titik wisata. Dengan begitu, setelah kegiatan itu akan diadakan pertemuan kembali dengan pihak kementerian pariwisata guna mengeksplorasi kerja sama yang lain sebagaimana dapat dikerjakan bersama-sama.



Gambar 10. Kampanye ECPAT Indoensia dengan Angkasa Pura II di Bandara Soekarno-Hatta terkait Pencegahan Pariwisata Seks Anak

Sumber: Website ECPAT Indonesia⁶⁸

_

⁶⁸ —Pencegahan Pariwisata Seks Anak di Bandara - ECPAT Indonesia," diakses 22 Juni 2023, https://ecpatindonesia.org/berita/airport-campaign/.

Kerja sama ECPAT di Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. ECPAT Indonesia yakni bekerja sama dengan P.T. Angkasa Pura II yang dinaungi oleh pemerintah Indonesia seperti yang terlihat pada Gambar 10. Angkasa Pura II bekerja sama dengan ECPAT Indonesia yakni mengenalkan kampanye anri pariwisata seks anak di DKI Jakarta. Kampanye tersebut memiliki tujuan guna turis-turis yang berkunjung agar mengetahui bahwasannya negara Indonesia guna memerangi eksploitasi seksual anak di lingkup pariwisata secara serius. Adapun kampanye ini memiliki tujuan guna memberikan peringatan pada masyarakat akan akibat yang didapatkan jika mereka mendukung adanya tindak kekerasan seksual serta eksploitasi anak di negera Indonesia. Kampanye ini dilakukan di bandara Soekarno-Hatta bagian kedatangan internasional yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan.

ECPAT Indonesia juga melakukan kerja sama dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2015 dengan mebuat riset kecil dan sosialisasi. Sebelumnya sudah pernah dilakukan rangkaian pelatihan ke 10 kota di Indonesia diantaranya Pulau Seribu, Nias, Gunung Kidul, Bogor dan lain-lain. Ini merupakan bagian dari upaya mengedukasi masyarakat yang akhirnya beberapa informasi dari pelatihan-pelatihan tersebut dituangkan dalam buku panduan wisata pedesaan ramah anak yang diterbitkan pada tahun 2018. Saat ini, KemenPPPA sendiri telah mencantumkan indikator untuk kota layak anak, dimana wilayah-wilayah di Indonesia akan mendapatkan poin plus ketika memiliki program wisata pedesaan ramah anak yang bebas dari tindak kekerasan maupun eksploitasi seksual pada

anak dan perempuan. Selain itu, ECPAT Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga pemerintahan, seperti Lembaga Perlindungan Saksi sekaligus Korban (LPSK), serta Kementrian Sosial RI, yakni shelter Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) serta Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) guna memberikan pelatihan keterampilan pada para korban sebelum mereka dikembalikan kepada keluarga.



Gambar 11. Kerja sama ECPAT Indonesia bersama LPSK dalam Rangka Melindungi Anak Indonesia terhadapa Kejahatan Pariwisata Seks Anak

Sumber: Website ECPAT Indonesia⁶⁹

LPSK atau disebut dengan Lembaga Perlindungan Saksi maupun Korban ialah instansi pemerintah guna memberi perlindungan kepada saksi ataupun korban, kerja sama ECPAT Indonesia serta LPSK telah berjalan dalam upaya memberi perlindungan kepada saksi maupun korban dimana ECPAT Indonesia

digilib.uinsa.ac.id digili

⁶⁹ – Melindungi Anak Indonesia Bersama LPSK - ECPAT Indonesia," diakses 22 Juni 2023, https://ecpatindonesia.org/berita/melindungi-anak-indonesia-bersama-lpsk/.

akan mendampingi setiap korban tindak eksploitasi seksual terhadap anak.

Pastinya kerja sama rtersebut sangatlah penting bagi keduanya, dikarenakan

ECPAT Indonesia tidak dapat kerja sendiri guna menangani kasus tersebut.

Pada 13 Mei 2015 seperti pada **Gambar 11.** ECPAT Indonesia bersamaan dengan Mr. Theo Noten dan Mrs. Jacqueline Kodden dari ECPAT Belanda dimana sedang melakukan kunjungan ke Indonesia mendapat kesempatan mengunjungi LPSK guna mengukuhkan kerja samanya. Di pertemuan tersebut berlokasi di kantor LPSK ECPAT disambut oleh Komisioner LPSK Bapak Edwin Partogi Pasaribu, SH., Ibu Lies Sulistiani, SH., MH. serta Bpk Dr. H. Askari Razak, SH., MH.

Pada kesempatan ini ECPAT Indonesia menaruh harapan kepada LPSK guna menjadi salah satu leading instansi dalam upaya implementasi Ratifikasi Opsional Protokol OPSC, dengan pihak-pihak pemerintahan yang lainnya sebagaimana melaksanakan serta membahas mekanisme kerja sama yang diciptakan dengan ECPAT Indonesia serta LPSK guna menyalurkan restitusi serta kompensasi pada korban. Namun, Mr. Theo dari ECPAT Belanda memberikan best practice terhadap menangani korban serta saksi yang ada di Belanda guna bahan pembelajaran bagi lingkup LPSK yang dapat diterapkan di negara Indonesia serta mekanisme kerja sama dengan ECPAT Belanda dalam menangani kasus Ekspolitasi Seksual Komersial terhadap Anak (ESKA) dengan instansi yang ada di negara Belanda.



Gambar 12. *Workshop* Penyusunan Panduan Desa Wisata Ramah Anak dalam Rangka Kerja sama ECPAT Indonesia dengan KemenPPPA

Sumber: Website ECPAT Indonesia⁷⁰

ECPAT Indonesia melakukan kerja sama dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan maupun Perlindungan Anak (KPPPA) sesuai dengan **Gambar 12.** Penyelenggaraan *workshop* guna menyusun panduan desa wisata yang ramah terhadap anak terjadi pada 22 Oktober 2018 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat.

Penyusunan akan Panduan dari Desa Wisata Ramah terhadap Anak disebabkan oleh situasi yang mana adanya pengaruh dari pariwisata yang dapat menghasilkan suatu keuntungan bagi devisa negara. Akan tetapi, pariwisata juga

digilib.uinsa.ac.id digili

Workshop Penyusunan Panduan Desa Wisata Ramah Anak - ECPAT Indonesia," diakses 22 Juni 2023, https://ecpatindonesia.org/berita/workshop-penyusunan-panduan-desa-wisata-ramah-anak/.

memberikan pengaruh yang rentan terhadap anak guna mengalami tindak eksploitasi seksual. Hasil assessment yang diterapkan di tujuh (7) titik wisata yakni Pulau Seribu (DKI Jakarta), Karang Asem (Bali), Gunung Kidul (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Toba Samosir serta Teluk Dalam (Sumatera Utara) oleh ECPAT Indonesia dibantu oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2016-2017, telah ditemukan bahwasannya terdapat praktek tindak kekerasan serta eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh beberapa wisatawan dalam wujud pelacuran anak, pronografi anak, hingga perdagangan seks terhadap anak. Pada tahun 2015 ECPAT Indonesia juga dilakukannya penelitian pada tiga titik wisata yakni Lombok (NTB), Kefamenanu (NTT) dan Jakarta Barat (DKI Jakarta), tiga lokasi tersebut ditemukan beberapa kasus kekerasan serta eksploitasi seksual terhadap anak. Berdasarkan dengan ini, KPPPA bersama ECPAT Indonesia berupaya mencegah adanya kasus eksploitasi seksual di titik wisata yakni membuat Panduan Desa Wisata Ramah terhadap Anak, hal ini dikarenakan yakni Desa Wisata yang mempunyai panduan guna pencegahan kasus eksploitasi seksual terhadap anak sejak dini.⁷¹

Workshop dimana mempunyai tujuan guna menyusun panduan desa wisata ramah terhadap anak, didatangi oleh tiga kementerian, yakni kementerian pariwisata, kementerian desa, KPPPA, hingga persatuan hotel maupun restauran Indonesia (PHRI) serta beberapa kumpulan perlindungan anak salah satunya aliansi down to zero serta plan Indonesia. Adapula masukan yang disalurkan oleh

71 Ibid

peserta seperti: (1) judul panduan yang di ubah dari —Panduan Desa Wisata Ramah Anak" menjadi —Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak", dengan perubahan judul menjadi —Wisata Pedesaan" guna mengakomodir dua sasaran yakni desa wisata serta kelurahan yang mempunyai wisata pedesaan. (2) indikator —Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak" yang berpacu pada —Indikator Desa Wisata" dari Kementerian Pariwisata, yang mana akan disinergikan melalui indikator —Kota Layak Anak", (3) Penghargaan atas terbentuknya serta implementasi akan Wisata Pedesaan Ramah terhadap Anak mengacu kepada penghargaan Kementerian Pariwisata, (4) Implementasi dari terbentuknya Wisata Pedesaan Ramah terhadap Anak yang nantinya akan berada dibawah naungan koordinasi Kementerian Pariwisata.

Tindakan yang diterapkan oleh ECPAT Indonesia guna dapat menjalin kemitraan lain dengan bidang swasta guna menolak PSA ialah menjalin kerja sama dengan PHRI agar isu terkait PSA akan makin dapat dikenal serta dipedulikan oleh hotel-hotel yang ada di Indonesia. Media yang dikenakan oleh ECPAT Indonesia guna menyampaikan Isu PSA pada khalayak luas yakni berupa flyer, buku, brosur, poster, *sign board*, *standing banner*, website, hingga media sosial lainnya.



Gambar 13. Pencegahan Pariwisata Seks Anak melalui Transportasi Taksi Sumber: Website ECPAT Indonesia⁷²

Taksi ialah sebagai salah satu sarana yang cukup penting dalam sektor pariwisata yang mana taksi yakni alat transportasi yang sangat mudah diakses oleh para wisatawan guna menjangkau dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan mengenakan taksi kita hanya dengan menyebutkan kemana kita hendak bepergian maka supir taksi tersebut akan mengantar kita ke tempat tujuan dimana kita hendak bepergian. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya banyak dari para wisatawan yang menanyakan lokasi guna dapat memperoleh seks anak, dengan maksud mereka hendak menuju tempat prostitusi anak tersebut. Hal ini tidak dapat dihindari dikarenakan penumpang juga memiliki hak guna dapat pergi kemanapun mereka ingin. Salah satu cara yang dilakukan ECPAT Indonesia guna menghentikan pariwisata seks anak terkhusus di Jakarta yakni dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan taksi, dimana ECPAT Indonesia akan mengadakan

⁷² —Pencegahan Pariwisata Seks Anak Melalui Taxi - ECPAT Indonesia," diakses 22 Juni 2023, https://ecpatindonesia.org/berita/pencegahan-pariwisata-seks-anak-melalui-taxi/.

pelatihan kepada semua supir taksi terkait bagaimana menghadapi penumpang yang seperti itu dengan tetap mengutamakan kepentingan penumpang. Lain pada itu, dengan kampanye yang dilakukan oleh memasang media kampanye pada taksi maka penumpang dapat melihat secara langsung dan akan mengurungkan niat tersebut. ECPAT Indonesia akan melakukan kerja sama dengan taxi putra seperti pada Gambar 13. yang dimana sebagai salah satu perusahaan taksi terbesar di Indonesia guna mencegah pariwisata seks anak. Selain dengan meningkatkan pengetahuan para supir taksi, dengan turut kerja sama dengan ECPAT Indonesia, taxi putra juga telah memberi pembuktian akan komitmennya dalam menjaga anak Indonesia dimana menjaga masa depan bangsa Indonesia. Dengan melakukan tindakan kecil ECPAT Indonesia dan taxi putra merencanakan hal tersebut.



Gambar 14. Bersama Memerangi Pariwisata Seks Anak: Kerja sama ECPAT Indonesia dengan ASPPI

Sumber: Website ECPAT Indonesia⁷³

_

⁷³ –Bersama Memerangi Pariwisata Seks Anak - ECPAT Indonesia," diakses 22 Juni 2023, https://ecpatindonesia.org/bersama-memerangi-pariwisata-seks-anak/.

Isu pariwisata yang menyangkut tentang seks anak ialah sebagai salah satu isu yang mana menjadi pusat perhatian dikarenakan meliputi dengan berbagai pihak terutama pada bidang industri wisata. Berdasarkan dengan hasil keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 46 kasus terhadap pariwisata seks anak sepanjang tahun 2010-2014, 40 anak perempuan serta 6 anak laki-laki disertai dengan 28 pelaku yang mana 27 ialah warga Indonesia serta 1 warga dari Belanda. Jumlah keseluruhan ini sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan yang sebenarnya terjadi.

Dengan demikian, ECPAT Indonesia mengajak asosiasi pelaku pariwisata Indonesia (ASPPI) dan juga hotel sofyan betawi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 14. Guna bersama-sama mengumandangkan isu pariwisata seks terhadap anak. Agar para pelaku wisata serta staf hotel yang berkontak fisik dengan tamu dapat mempunyai perspektif yang ramah terhadap anak serta melindungi anakanak Indonesia. ASPPI yang memiliki ribuan anggota di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat memagari pertahanan awal dimana dapat menghalangi terjangan para predator terhadap seks yang berdatangan ke Indonesia dengan maksud pariwisata seks terhadap anak. Dengan melalui hotel sofyan betawi diharapkan juga dapat membantu menjaga generasi anak Indonesia serta melaporkan hal-hal yang mencurigakan. ECPAT Indonesia juga berhadap agar seluruh pihak terutama yang berkecimpung pada bidang pariwisata guna bersamasama berjuang dalam membasmi pariwisata seks anak guna melindungi segenap anak Indonesia, sehingga dapat menjadikan masa depan anak lebih optimal guna kemajuan bangsa.

Kerja sama yang dilakukan ECPAT Indonesia dengan organisasi internasional seperti FBI, AFP, US DOJ ICITAP berupa edukasi sosialisasi guna melindungi anak dari tindak eksploitasi seksual terhadap anak, dan beberapa guna merespon penanganan kasus terkait kejahatan seksual anak yang terapkan oleh warga negara asing. Selanjutnya ECPAT Indonesia juga pernah menangani beberapa kasus dan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian. Yang terbaru pada tahun 2023 ini ada indikasi kasus kejahatan seksual pada anak tetapi masih dalam proses penyelidikan, disini ECPAT Indonesia melakukan diskusi intens dengan kepolisian Jakarta Selatan. Selain itu dengan pihak kepolisian cyber mabes polri juga dilakukan diskusi yang akhirnya pihak cyber membantu memberikan informasi-informasi secara digital terkait korban dan pelaku. ECPAT Indonesia juga bekerja sama tidak hanya dengan kepolisian di Indonesia, tetapi juga dengan police atase dari berbagai negara seperti dengan kedutaan Australia (Australian Federal Police), kemudian dengan pihak Federal Bureau of Investigation (FBI) di Amerika, dan kedutaan Belanda.

Dalam kerja sama dengan industri digital (seperti Google, Meta, Tik Tok, Twitter, Facebook, Youtube, IWF), ECPAT Indonesia menjadi bagian dari mitra terpercaya mereka dalam upaya perlindungan anak di platform digital. Dalam konteks ini ECPAT Indonesia dalam memberi masukan langsung ke industri digital untuk mengambil langkah keamanan ketika mendapati postingan di platform digital yang berbahaya bagi anak dan sering kali kebijakan terbaru yang mereka lakukan untuk upaya perlindungan anak di konsultasikan kepada ECPAT Indonesia.

Twitter yang diketahui sebagai platform guna menyampaikan perspektif. Akan tetapi, dalam hak eksploitasi seksual terhadap anak terutama di sektor pariwisata, twitter mempunyai komitmen guna keselamatan terhadap anak dalam platform itu sendiri. Sebagai - Trust & Safety Council Twitter" di Indonesia, ECPAT Indonesia dapat membantu dalam melaporkan temuan yang ada di twitter dimana dapat membahayakan pengetahuan anak lebih cepat kepada tim keselamatan twitter. Teruntuk facebook, ECPAT Indonesia dikenal sebagai bagian yang Safety Trusted Partner Facebook guna menyusun serangkaian kegiatan dalam hal mengedukasi serta mencegah tindak eksploitasi seksual terhadap anak terkhusus secara online, ECPAT Indonesia dapat menjadi tim yang dapat memantau konten yang sekiranya dapat membahayakan keselamatan anak pada platform facebook (whatsapp, instagram, maupun facebook). berkembangnya pengguna media sosial tiktok di Indonesia serta kerap digunakan sebagai platform tiktok juga disalahgunakan dalam konten yang tidak ramah terhadap anak. Sebagai mitra keselamatan ECPAT Indonesia melakukan kerja sama dengan tiktok guna dapat mengupayakan perlindungan anak di platform tersebut agar makin optimal. selain itu, tiktok dengan ECPAT Indonesia menyusun panduan keamanan dalam penggunaan media tiktok yang cukup bermanfaat bagi setiap pengguna dengan usia 13 tahun ke atas guna melindungi mereka dari penyalahgunaan media tiktok. Sebagai bagian dari mitra yang dipercaya guuna dapat melaporkan konten yang ada di platform youtube yang cenderung malanggar pedoman komunitas terkhusus terkait keselamatan anak, mitra yang dipercaya bagi pelapor akan memperoleh pelatihan khusus dari Youtube terkait dengan pedoman komunitas yang berlaku. Dengan mengawasi secara manual guna dapat membantu youtube terkait dengan pedoman komunitas yang sedang berlaku tidak dapat diidentidikasi dengan menggunakan teknologi secara sistem. Pelaporan yang diterapkan akan memperoleh prioritas dari tim youtube guna meninjau kembali konten-konten yang ada. ECPAT Indonesia akan melakukan kerja sama dengan Internet Watch Foundation (IWF) guna memutus rantai penyebaran materi kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak yang sedang dilakukan di media *online*. *Platform* pelaporan materi tindak kekerasan seksual yang telah dilaporkan oleh anak akan dianalisis serta data basenya akan di distribusikan kembali kepada pelaku usaha industri IT guna dapat menghilangkan serta menangkal materi itu di media internet. *Platform* ini juga dapat membantu setiap laporan kepada pihak kepolisian tentang anak yang sedang berada dalam situasi *emergency* dengan melakukan kerja sama internasional.⁷⁴

ECPAT Indonesia tidak melakukan penanganan langsung terhadap korban, lebih banyak merujuk kepada lembaga-lembaga terkait yang memeiliki wewenangan dan sumber daya dalam menangani situasi tersebut, itu sebabnya ECPAT Indonesia bekerja sama dengan SAPA 129 (hotline pelaporan dan penanganan kekserasan pada anak dan perempuan yang dikelola KemenPPPA serta dengan lembaga-lembaga swadaya lainnya yang memiliki tempat dan program terkait dengan korban. Biasanya program yang dijalankan akan berupa pendampingan secara psikologi untuk para korban dan juga terdapat pelatihan-pelatihan spiritual yang difasilitasi.

_

⁷⁴ — Aki Kami - ECPAT Indonesia," diakses 22 Juni 2023, https://ecpatindonesia.org/aksi-kami/.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mengatasi kejahatan pariwisata seks anak, ECPAT Indonesia memiliki beberapa peran. Pertama yaitu *implementers* (pelaksana) yang mencakup perlindungan dan pencegahan. Untuk ranah perlindungan, ECPAT Indonesia mengawasi situasi kejahatan pariwisata seks anak di Indonesia serta membantu para korban melalui jalur bantuan hukum. Sedangkan, di ranah pencegahan ECPAT Indonesia meningkatkan kesadaran terkait kejahatan pariwisata seks anak yang ada di Indonesia berupa kampanye, sosialisai dan pelatihan. Kedua yaitu *catalysts* (katalis) dalam bentuk advokasi dimana ECPAT Indonesia mendorong pemerintah untuk menetapkan peraturan atau regulasi serta kebijakan yang lebih optimal guna menghilangkan kejahatan pariwisata seks anak di Indonesia. Ketiga yaitu *partmers* (mitra) dalam bentuk kerja sama dimana ECPAT Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pada bidang publik serta swasta guna mengatasi kejahatan pariwisata seks anak yang ada di Indonesia.

B. Saran

Kepada peneliti sejanjutnya agar menelaah dan diteliti lebih lanjut sejauh mana implementasi dari peran yang sudah dilakukan oleh ECPAT Indonesia serta menggali lebih dalam data terkait kasus PSA di Indonesia melalui instansi terkait seperti Kemenpar, KemenPPPA, KPAI, YKAI, dan ECPAT Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- —Ahmad Sofian, Koordinator Nasional ECPAT Indonesia: Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Meningkat | Republika Online." Diakses 22 Juni 2023. https://republika.co.id/berita/koran/wawasan/nnibk929/ahmadsofiankoordi nator-nasional-ecpat-indonesia-eksploitasi-seksual-anak-di-indonesia-meningkat.
- -Aksi Kami ECPAT Indonesia." Diakses 22 Juni 2023. https://ecpatindonesia.org/aksi-kami/.
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Bah, Yahya Muhammed. —COMBATING CHILD ABUSE IN INDONESIA:

 ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES,".
- Bersama Memerangi Pariwisata Seks Anak ECPAT Indonesia." Diakses 22 Juni 2023. https://ecpatindonesia.org/berita/bersama-memerangi-pariwisata-seks-anak/.
- Bruno Dituntut 7 Tahun Penjara." Diakses 22 Juni 2023. https://radarlombok.co.id/bruno-dituntut-7-tahun-penjara.html.
- -CATATAN AKHIR TAHUN 2020 ECPAT INDONESIA ECPAT Indonesia."

 Diakses 16 Juli 2023. https://ecpatindonesia.org/berita/catatan-akhir-tahun-2020-ecpat-indonesia/.
- Dany, dan Anggun Putri Dewanggi. —STRATEGI KOMUNIKASI ECPAT INDONESIA UNTUK MEMERANGI PARIWISATA SEKS ANAK

- (PSA)." Communication 9, no. 2 (16 Oktober 2018): 127. https://doi.org/10.36080/comm.v9i2.735.
- —Divonis 15 Tahun Penjara, Kakek Cabul Asal Australia Ajukan Banding Tribun-bali.com." Diakses 22 Juni 2023.
 https://bali.tribunnews.com/2016/10/25/divonis-15-tahun-penjara-kakek-cabul-asal-australia-ajukan-banding.
- -ECPAT INDONESIA di Instagram: _Perempuan dan Anak adalah bagian dari warga masyarakat yang biasanya rentan terhadap kekerasan dan pelecehan. ECPAT Indonesia melaksanakan lokakarya sehari bersama stakeholder mitra UPTD PPA salah satunya UPTD PPA Kab. Sleman. Lokakarya sehari bersama stakeholders mitra UPTD PPA dimaksudkan untuk membangun kesamaan perspektif tentang perlindungan anak dan implementasinya dalam mekanisme penanganan kasus yang dilakukan. Peserta Lokakarya yang hadir dalam lokakarya ini adalah mereka yang telah terlibat dalam penanganan kasus atau layanan terhadap korban di wilayah setempat. Diakses 22 Juni 2023. https://www.instagram.com/p/Cd-OVrvrBef/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg==.
- —Eksplorasi Kerja sama dengan Kementerian Pariwsata ECPAT Indonesia."
 Diakses 6 Desember 2022. https://ecpatindonesia.org/berita/eksplorasi-kerja sama-dengan-kementerian-pariwsata/.
- Fredi Yuniantoro. EKSPLOITASI SEKSUAL SEBAGAI BENTUK
 KEJAHATAN KESUSILAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-

- UNDANGAN." JUSTITIA JURNAL HUKUM 2, no. 1 (20 April 2018). https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227.
- French man accused of molesting hundreds of children dies in Indonesia BBC News." Diakses 22 Juni 2023. https://www.bbc.com/news/world-asia-53391233.
- Hero Nehemia Lasapu, Deicy N. Karamoy, dan Lusy K.F.R Gerungan.

 —PERLINDUNGAN ANAK ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL

 MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989,".

 Diakses 3 Mei 2023.
- Hidayat, Rahmat. -KAJIAN BENTUK- BENTUK EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL ANAK DI LINGKUNGAN WISATA PROVINSI SULAWESI UTARA." *Sosiohumaniora* 17, no. 3 (2 April 2015): 237. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8342.
- ———. ———. ———. Kajian Situasi Dan Kondisi Anak Korban Pariwisata Seks Di Lingkungan Wisata Kota Makassar." *Jurnal Politikom Indonesiana* 4, no. 1 (25 Juli 2019): 202–18. https://doi.org/10.35706/jpi.v4i1.2002.
- Indonesia Dibayangi Problem Serius Pariwisata Seks Anak." Diakses 6
 Desember 2022. https://www.vice.com/id/article/4aybew/indonesia-termasuk-negara-favorit-pedofil-di-asia.
- Irawan, Jingga, dan Ridha Amaliyah. —UPAYA INDONESIA MENGURANGI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI INDUSTRI PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2030" 9 (2022): 14.

- -Kredibilitas dalam Penelitian Kualitatif Kompasiana.com." Diakses 11 Juli 2023.
 - https://www.kompasiana.com/osydea/5587b266319373f5058b456a/kredibilitas-dalam-penelitian-kualitatif.
- Langkah Awal Dalam Melindungi Anak Dari Situasi Eksploitasi Seksual di Destinasi Wisata Bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)
 ECPAT Indonesia." Diakses 22 Juni 2023.
 https://ecpatindonesia.org/berita/langkah-awal-dalam-melindungi-anak-dari-situasi-eksploitasi-seksual-di-destinasi-wisata-bersama-gabungan-industri-pariwisata-indonesia-gipi/.
- Lantaeda, Syaron Brigette, Florence Daicy J Lengkong, dan Joorie M Ruru.

 —PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

 DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA TOMOHON,".
- Lestari, Eka Mulyani, dan I Made Anom Wiranata. —PERAN ECPAT DALAM MENANGANI CSEC OLEH WISATAWAN ASING DI THAILAND,"8.
- Lewis, David. The Management of Non-Governmental Development

 Organizations: An Introduction. 2nd ed. Florence: Taylor and Francis,

 2004.
- —Lindungi Anak-Anak, Archipelago Gabung dengan The Code." Diakses 22 Juni 2023. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/341357/lindungi-anakanak-archipelago-gabung-dengan-the-code.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. —Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook," Kedua. United Kingdom: SAGE Publication.

- -Melindungi Anak Indonesia Bersama LPSK ECPAT Indonesia." Diakses 22 Juni 2023. https://ecpatindonesia.org/berita/melindungi-anak-indonesia-bersama-lpsk/.
- Mohtar Mas'oed. *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990.
- Muhammad Naufal. —WN Amerika yang Terjerat Kasus Pedofilia Dideportasi Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta," 22 Juni 2023. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/28/22583781/wn-amerika-yang-terjerat-kasus-pedofilia-dideportasi-imigrasi-bandara?page=all.
- Nalele, Yohanes Benedicktus Meninu. —PERAN END CHILD PROSTITUTION,
 CHILD PORNOGRAPHY AND TRAFFICKING OF CHILDREN FOR
 SEXUAL PURPOSES (ECPAT) DALAM MENGATASI EKSPLOITASI
 SEKSUAL KOMERSIL ANAK (ESKA) DI INDONESIA (2011 –
 2015),",19.
- Novi, Silvia. -HAMBATAN PEMERINTAH INDONESIA DAN ECPAT

 DALAM MENANGANI PARIWISATA SEKS ANAK MELALUI RAN

 PTPPO DAN ESKA,".
- -Our Secretariat ECPAT." Diakses 22 Juni 2023. https://ecpat.org/about-us/.
- Pedofil Buronan FBI Ini Lakukan Aksinya di Indonesia Ayo Jakarta." Diakses
 Juni 2023. https://www.ayojakarta.com/jakarta-selatan/pr-76752377/Pedofil-Buronan-FBI-Ini-Lakukan-Aksinya-di-Indonesia?page=all.

- —Pencegahan Pariwisata Seks Anak di Bandara ECPAT Indonesia." Diakses 22 Juni 2023. https://ecpatindonesia.org/berita/airport-campaign/.
- —Pencegahan Pariwisata Seks Anak Melalui Taxi ECPAT Indonesia." Diakses 22 Juni 2023. https://ecpatindonesia.org/berita/pencegahan-pariwisataseks-anak-melalui-taxi/.
- —PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI BISNIS WISATA." Diakses 22 Juni 2023. https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/5711perlindungan_hukum_anak-di-bisnis-wisata/.
- Surat kepada Ruri Wijareni. —Pemintaan Data KPAI," 11 November 2022.
- —Pertemuan Penyusunan Laporan OPSC dan OPAC di KPPPA ECPAT Indonesia." Diakses 22 Juni 2023. https://ecpatindonesia.org/berita/pertemuan-penyusunan-laporan-opsc-dan-opac-di-kpppa/.
- Rafferty, Yvonne. —Child Trafficking and Commercial Sexual Exploitation: A Review of Promising Prevention Policies and Programs." *American Journal of Orthopsychiatry* 83, no. 4 (2013): 559–75. https://doi.org/10.1111/ajop.12056.
- Ramlan. —Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak." ECPAT Indonesia, 2006.
- Rasyidah, Resa. —INGO Sebagai Agent of Aid: Peran dan Kontribusi Oxfam Internasional dalam Penyaluran Bantuan untuk Pengentasan Kemiskinan," 2014.

- Rijali, Ahmad. –ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- Septia, Merita Putri, Jalan H Soedarto, dan Kotak Pos. —UPAYA INDONESIA

 DALAM PENANGANAN KASUS PEDOFILIA INTERNASIONAL DI
 PULAU BALI,".
- -Surat Al-Isra Ayat 31 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb."

 Diakses 12 Juli 2023. https://tafsirweb.com/4635-surat-al-isra-ayat-31.html.
- -Tentang Kami ECPAT Indonesia." Diakses 14 Maret 2023.

 https://ecpatindonesia.org/tentang-kami/.
- —Terbukti Cabuli 4 Bocah, Bule Belanda Dihukum 3 Tahun Penjara." Diakses 22 Juni 2023. https://news.detik.com/berita/d-2228537/terbukti-cabuli-4-bocah-bule-belanda-dihukum-3-tahun-penjara.
- Wahyudha, Baghas. —PERAN ECPAT (END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES) DALAM MENGATASI CHILD SEX TOURISM DI INDONESIA," t.t.
- Windari, Rusmilawati. —Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global Local Based Approach (Glocalization)."

 Soumatera Law Review 2, no. 2 (20 November 2019): 282.
 https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369.

- —Workshop Penyusunan Panduan Desa Wisata Ramah Anak ECPAT Indonesia."
 Diakses 22 Juni 2023. https://ecpatindonesia.org/berita/workshop-penyusunan-panduan-desa-wisata-ramah-anak/.
- —Wujudkan Bersama Asian Games 2018 Ramah Anak ECPAT Indonesia."
 Diakses 22 Juni 2023. https://ecpatindonesia.org/berita/3666/.
- Yana, Aisyah Fitri. —PERAN END CHILD TRAFFICKING IN ASIAN TOURIM

 (ECPAT) DALAM MENANGGULANGINCHILD TRAFFICKING DI

 INDONESIA (2009-2012)" 1, no. 2 (2014).
- Yovita, Valentina Oki. –KERJA SAMA INDONESIA END CHILD PROSTITUTION IN ASIAN TOURISM (ECPAT) DALAM MENANGANI MASALAH EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI SEKTOR PARIWISATA INDONESIA,", 10.

Zuchri Abdussamad. Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press, 2021.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A